

**DIPLOMASI TAKHTA SUCI VATIKAN DALAM MENGOTORISASI
PRELAT GEREJAWI DI REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK, 2008–2018**

(Skripsi)

Oleh

**VLADIMIR AUGUSTIAN SIMBOLON
NPM 1916071012**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

DIPLOMASI TAKHTA SUCI VATIKAN DALAM MENGOTORISASI PRELAT GEREJAWI DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, 2008–2018

Oleh

VLADIMIR AUGUSTIAN SIMBOLON

Dari dekade 1950-an sampai 2000-an, umat Katolik di RRT menghadapi dualisme dalam praktik peribadatan. Pertama, mereka yang setia kepada Paus di Vatikan atau biasa disebut “Gereja bawah tanah” dan kedua, mereka yang setia kepada rezim komunis Tiongkok yang disebut “Gereja Patriotik”. Dualisme tersebut berakibat pada penunjukan sepihak para prelat Gerejawawi oleh Pemerintah RRT. Takhta Suci, sebagai otoritas tunggal resmi yang sah dalam menunjuk dan menahbiskan prelat Gerejawawi kemudian berdiplomasi dalam mendapatkan kembali wewenang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan upaya diplomasi yang dibangun oleh Takhta Suci terhadap RRT. Fokus penelitian ini ialah diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam periode 2008–2018. Dengan menggunakan teknik studi literatur, berbagai sumber data, utamanya dari laman resmi Takhta Suci dan sumber-sumber terkait lainnya, dianalisis dengan metode *content analysis*. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi dan triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Takhta Suci mewujudkan diplomasinya melalui tiga jenis diplomasi, yaitu diplomasi publik, diplomasi rahasia, dan diplomasi kepausan. Tiap-tiap jenis diplomasi membawa karakteristiknya masing-masing yang dicirikan dalam tujuan diplomasi yang diusung, kerangka diplomasi yang coba dibangun, serta elemen-elemen lainnya. Sebagai hasil dari diplomasi yang dilakukan Takhta Suci tersebut, Takhta Suci meraih kembali otoritas dalam penunjukan prelat Gerejawawinya di RRT melalui *Provisional Agreement between the Holy See and the People's Republic of China* yang ditandatangani di Beijing pada 2018. Melalui perjanjian tersebut, Takhta Suci mendapat hak veto dalam meninjau nominasi Uskup, dan Pemerintah RRT mendapat keleluasaan dalam mengatur kelompok keagamaan secara domestik.

Kata kunci: Takhta Suci, diplomasi, Republik Rakyat Tiongkok, otoritas.

ABSTRACT

THE HOLY SEE'S DIPLOMACY ON AUTHORIZING CHURCH PRELATES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, 2008–2018

By

VLADIMIR AUGUSTIAN SIMBOLON

From the 1950s to the 2000s, Catholics in China have faced dualism in religious practices. First, those who are loyal to the Pope in the Vatican, the "underground Church" and secondly, those who are loyal to the Chinese communist regime, the "Patriotic Church". This dualism resulted in the unilateral appointment of Church prelates by the Chinese government. The Holy See, as the sole and legitimate authority in appointing Church prelates, is then involved in series of diplomacy on regaining that authority. This study used a qualitative approach with descriptive analysis, to describe the diplomatic efforts made by the Holy See towards China. The focus of this research is on the diplomacy carried out by the Holy See in the 2008–2018 period. By using literature study techniques, various data sources, mainly from the Holy See's official website and other related sources, were analyzed by content analysis methods. The data was then analyzed using data reduction and triangulation techniques. The result of this study is that the Holy See implement its diplomacy through three types of diplomacy: public diplomacy, secret diplomacy and papal diplomacy. Each type of diplomacy brings its own characteristics, goals, framework, and other elements. As a result of the Holy See's diplomacy, the Holy See regained authority through the Provisional Agreement between the Holy See and the People's Republic of China, signed in Beijing in 2018. Through this agreement, the Holy See gets a veto in reviewing bishop nominations, and the Chinese government regulating religious groups domestically.

Keywords: Holy See, diplomacy, People's Republic of China, authority.

**DIPLOMASI TAKHTA SUCI VATIKAN DALAM MENGOTORISASI
PRELAT GEREJAWI DI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, 2008—2018**

Oleh

VLADIMIR AUGUSTIAN SIMBOLON

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **Diplomasi Takhta Suci Vatikan dalam Mengotorisasi Prelat Gereja di Republik Rakyat Tiongkok, 2008–2018**

Nama Mahasiswa : **Vladimir Augustian Simbolon**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916071012**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing

Iwan Sulistywo, S.Sos., M.A.

NIP. 198604282015041004

Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.

NIP. 199006062019031019

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

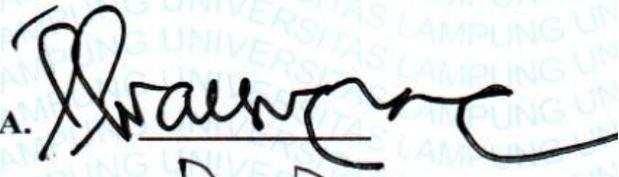
Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

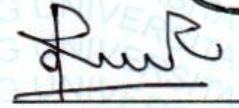
MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

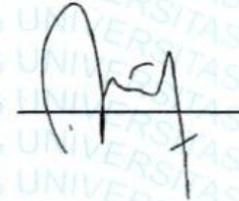
Ketua : **Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A.**



Sekretaris : **Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama: **Arizka Warganegara, M.A., Ph.D.**



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Vladimir Augustian Simbolon

NPM. 1916071012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 8 Agustus 2000 dari pasangan Bapak Cornelius Leysman dan Ibu Christina. Penulis merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di TK Fransiskus Tanjungkarang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SD Xaverius 3 Bandar Lampung, SMP Xaverius 4 Bandar Lampung dan SMA Xaverius Bandar Lampung.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik, seperti menulis puluhan esai dan artikel, serta mendirikan IRis.co.id, media daring yang menjadi wadah edukasi Hubungan Internasional bagi seluruh kalangan. Selain itu, penulis juga aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yaitu English Society dan pernah menjabat sebagai Member of Public Relations Department. Pada tahun 2022, penulis mengikuti program Magang di Foreign Commercial Service, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Pada akhir tahun 2022, penulis mendapatkan kesempatan menjadi *awardee* Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dan menempuh studi semester 7 di Università di Pisa, Italia. Penulis juga berkesempatan mengunjungi 21 negara di Eropa selama melaksanakan studi di Italia.

Motto

*Cari giovani, non abbiate paura di fare scelte decisive nella vita. **Avere fede;**
il Signore non ti abbandonerà!*

(Yang Mulia Bapa Suci Paus Fransiskus)

The LORD is my shepherd ; I shall not want.

*He maketh me to lie down in green pastures; He leadeth me beside the still
waters.*

He restoreth my soul; He guideth me in straight paths for His name's sake.

*Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; And I shall
dwell in the house of the **LORD** for ever.*

(Psalm 23:1-3,6)

***Totus tuus** (sepenuhnya milik-Mu)*

(Santo Paus Yohanes Paulus II)

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah, Ibu dan Kakak tercinta
Serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucap atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan, anugerah, dan kasih-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul *Diplomasi Takhta Suci Vatikan dalam Mengotorisasi Prelat Gerejawi di Republik Rakyat Tiongkok, 2008–2018* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang senantiasa sabar dalam membimbing, memberikan masukan, dan pengalaman, baik intelektual maupun praktikal kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi;
4. Bang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang selalu membimbing dan memberikan masukan kepada penulis terkait skripsi;
5. Pak Arizka Warganegara, M.A., Ph.D selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan wawasan baru, saran, dan motivasi agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi serta penulis menjadi insan yang bermanfaat di masa depan;
6. Dosen-dosen yang membantu kelancaran proses administrasi skripsi ini semenjak penulis mengikuti Magang di Jakarta dan berkulia di Italia, utamanya Madame Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A., Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., dan Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A.

7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan ilmu, waktu, tenaga, dan bantuan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Keluarga penulis, Bapak, Mamak, Kakak, Ibu Opung, yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studinya;
9. Alya Nurhafizah, yang dalam kondisi apapun, selalu mendoakan, menemani, menghibur, dan menyemangati penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Hammam Mahfudh dan Shinta Adelia Sukma, tim **HVS**, yang sejak didirikannya, bersama-sama menyongsong masa depan dan mencoba berbakti dan berkontribusi kepada masyarakat luas;
11. Victoria Alfita Santosa, yang tiada lelahnya memancarkan aura positif dan semangat serta candaannya yang seringkali tidak jelas, sehingga penulis terhibur dan terpacu dalam menyelesaikan studi;
12. Bung Yoga Adi Pratama, *coach* sekaligus mentor, yang tiada hentinya memberikan tips and tricks seputar menyusun skripsi dan administrasinya;
13. Member **Jang Han Seo Best Boy**, Thor, Arif sang Moderator, Basa Basi, Dennis, Divya, Mas Bimo, Hani, Hayyu, Manda, Nana, Renda, Sulis yang Baik Hati, Viana dan Bung Yoga, yang tiada hentinya menyemangati penulis;
14. Segenap kawan yang tiada lelah membantu, Mami Fira, Bapack Farhan Aufa, dan Taufiq, Kak Salsa, Kak Ave;
15. Serta seluruh pihak yang mendoakan dan membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 5 Juni 2023

Vladimir Augustian Simbolon

NPM. 1916071012

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penelitian Terdahulu.....	6
1.3. Rumusan Masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Konseptual	12
2.1.1. Konsep Diplomasi.....	13
2.1.2. Konsep Otoritas	18
2.1.3. Konsep Hierarki Gereja Katolik	20
2.1.4. Teori Konsensus	23
2.2. Kerangka Pemikiran	24
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1. Jenis Penelitian	26
3.2. Fokus Penelitian	28
3.3. Sumber Data	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Teknik Analisis Data	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Gambaran Umum Hubungan Bilateral Takhta Suci – Tiongkok	32

4.2. Otorisasi Prelat Gerejawi di RRT.....	37
4.2.1. Otorisasi Prelat Gerejawi di RRT oleh Takhta Suci.....	38
4.2.2. Otorisasi Prelat Gerejawi di RRT oleh CCPA.....	45
4.2.3. Ikhtisar Otorisasi Prelat Gerejawi di RRT	48
4.3. Diplomasi Takhta Suci dalam Mengotorisasi Prelat Gerejawi di RRT, 2008–2018	51
4.3.1. Diplomasi Publik Takhta Suci	51
4.3.2. Diplomasi Rahasia Takhta Suci.....	61
4.3.3. Diplomasi Kepausan Takhta Suci.....	68
4.3.4. Ikhtisar Diplomasi Takhta Suci di RRT	76
4.4. Konteks Umum dan Perkembangan Gereja Katolik Era Kontemporer di RRT	79
V. SIMPULAN DAN SARAN	83
5.1. Simpulan.....	83
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hasil pemetaan VosViewer peneliti	7
Gambar 2.1. Hierarki Gereja Katolik	22
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian	25

DAFTAR SINGKATAN

BCCCC	: Bishops Conference of the Catholic Church in China
CCPA	: Chinese Catholic Patriotic Association
CPO	: China Philharmonic Orchestra
IAEA	: International Atomic Energy Agency
KHK	: Kitab Hukum Kanonik
KWI	: Konferensi Waligereja Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKT	: Partai Komunis Tiongkok
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini menelaah diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci Vatikan dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di Tiongkok dalam rentang waktu tahun 2008–2018. Penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan atas landasan justifikasi teoretis dan empiris, justifikasi metodologis, serta kebaruan yang ditemukan oleh peneliti. Maka dari itu, pada latar belakang penelitian ini, peneliti menyajikan riwayat singkat Gereja Katolik di Tiongkok, akar permasalahan dualisme Gereja Katolik di Tiongkok, intensi Takhta Suci dan pemerintah Tiongkok atas umat Katolik di Tiongkok, serta justifikasi teoretis dan empiris menggunakan konsep dan teori terkait, yaitu konsep diplomasi, konsep otoritas, konsep hierarki Gereja Katolik, serta teori konsensus. Dalam bab ini pula, peneliti menyajikan penelitian-penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian ini.

1.1. Latar Belakang

Sejak dekade 1950-an hingga 2000-an, umat Katolik di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menghadapi dualisme dalam praktik peribadatan. Pertama, mereka yang setia kepada Paus di Vatikan, atau biasa disebut sebagai “Gereja bawah tanah” (Pin Mei, 1996). Kedua, mereka yang tergabung dalam Chinese Catholic Patriotic Association (CCPA), sebuah lembaga keagamaan Katolik yang dibentuk dan diakui secara resmi oleh Pemerintah RRT (Pin Mei, 1996). Mereka yang setia kepada rezim komunis tersebut kemudian secara umum disebut sebagai “Gereja patriotik” (Pin Mei, 1996). Kasus ini tergolong sangat langka dan menjadi satu-satunya dalam sejarah modern Gereja Katolik Roma.

Dualisme ini berakar dari sejarah terbentuknya rezim komunis di Tiongkok. Saat itu, Mao Zedong mengumumkan kemenangan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam Perang Saudara Tiongkok, serta memproklamasikan berdirinya RRT pada tahun 1949 yang berlandaskan Marxisme-Leninisme (Dikötter, 2013). Rezim komunis Mao pada awalnya memperbolehkan Gereja Katolik beroperasi secara independen (Dikötter, 2013). Namun, pengawasan hukum kemudian ditingkatkan dan setiap misionaris harus mendaftar ke pemerintah. Bahkan otoritas Tiongkok menginterogasi setiap umat Katolik beserta rumah sakit dan sekolah yang didirikan oleh umat Katolik. Pemerintah Tiongkok kemudian melakukan penangkapan massal kepada para misionaris dan secara sepihak memutus hubungan diplomatik dengan Takhta Suci pada 1951 (Lau, 2020). Pada musim panas 1953, setelah Mao memerintahkan pengeksekusian anggota Legio Maria yang dituduh sebagai unit paramiliter, Gereja Katolik di Tiongkok telah secara utuh ditindas (Dikötter, 2013).

Campur tangan pemerintah Tiongkok dalam praktik keagamaan Katolik di negaranya kemudian menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya ialah pengangkatan sepihak prelat Gerejawi, utamanya para Uskup. Pemerintah Tiongkok mengangkat sendiri, secara sepihak, dan tanpa sepengetahuan Vatikan, para Uskupnya. Tentu, pemerintah Tiongkok memilih dan mengangkat mereka yang setia berafiliasi kepada PKT, serta mau mengabdikan hidupnya bagi rezim komunis. Mengetahui hal tersebut, Vatikan mengancam hal tersebut dan mengeluarkan sebuah dekret pada tahun 1949, sebagai respons Gereja atas merebaknya ajaran komunisme yang dinilai bertentangan dengan ajaran sosial Gereja Katolik (Schlosser, 2015). Paus Pius XII, sebagai Kepala Takhta Suci saat itu menyetujui penerbitan dekret tersebut dan menyetujui usulan agar umat Katolik yang menganut komunisme akan menerima ekskomunikasi (pengucilan) serta dianggap murtad dari iman Kristiani (Schlosser, 2015).

Untuk memahami kasus ini secara lebih mendalam, kita harus pahami terlebih dahulu, bahwa pengangkatan dan penunjukan seorang prelat Gerejawi, utamanya seorang Uskup, merupakan tanggung jawab dan wewenang Paus di Roma (USCCB, 2020). Sebagai satu-satunya lembaga resmi yang berwenang, Takhta Suci, yang merupakan perpanjangan tangan Paus melalui Kuria Roma, menunjuk serta menahbiskan para Uskup di seluruh dunia (Ratzinger & Schönborn, 1994).

Kewenangan yang dimiliki oleh Takhta Suci ini dilakukan tanpa terikat oleh kedaulatan atau hukum suatu negara, atau bersifat supranasional (Araujo, 2013). Dengan demikian, pengangkatan Uskup secara sepihak oleh rezim komunis Tiongkok tentu melangkahi wewenang yang dimiliki oleh Takhta Suci itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui, ketika sebuah negara mulai menganut sistem komunisme, terdapat kecenderungan bagi pemerintah negara tersebut untuk menekan dan menindas kelompok-kelompok keagamaan yang ada di negaranya (Nikolova & Djankov, 2018). Pemerintah yang beraliran komunis juga menindas lembaga pendidikan yang masih mengajarkan pelajaran agama di sekolah-sekolah, memaksa mereka untuk memperbarui kurikulumnya tanpa pendidikan agama. Sikap antipati komunisme terhadap agama didasarkan oleh pemikiran revolusioner Vladimir Lenin. Lenin menyatakan bahwa “seorang komunis sejati akan selalu mempromosikan ateisme dan memerangi agama, karena itu merupakan candu psikologis yang merampas hak pilihan manusia mereka, kemauan mereka, sebagai pria dan wanita, untuk mengendalikan realitas mereka sendiri” (Kengor, 2019).

Secara demografis, umat Katolik di Tiongkok Daratan mencapai 9 juta jiwa pada tahun 2011, di mana 5,7 juta di antaranya berafiliasi kepada rezim komunis sebagai anggota CCPA (Pew Research Center, 2011). Sementara itu, menurut data Union of Catholic Asian News, diestimasikan ada 13 juta umat Katolik di keseluruhan wilayah Tiongkok, atau kurang lebih menyumbang 1% dari total populasi Tiongkok (Union of Catholic Asian News, n.d.). 13 juta umat Katolik tersebut tersebar ke dalam 20 Keuskupan Agung, 95 Keuskupan Suffragan, 29 Prefektur Apostolik dan satu Administrator Apostolik (Union of Catholic Asian News, n.d.).

Meski hanya menyumbang 1% dari total populasi, Pemerintah RRT memiliki kepentingan besar atas umat Katolik. Menurut Lanxin Xiang, pemerintah Tiongkok mencari stabilitas sosial dalam negerinya dengan cara mengatur kelompok-kelompok keagamaan, tidak terkecuali Gereja Katolik (Xiang, 2018). Di lain sisi, Gereja Katolik secara jelas berkepentingan dalam melanjutkan proyek ekspansi globalnya (Xiang, 2018). Maka, ketika kedua belah pihak mulai membenturkan kepentingannya satu sama lain, diplomasi menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dalam kajian Hubungan Internasional,

Barston menjelaskan bahwa negosiasi merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan merekonsiliasi posisi yang bertentangan untuk mencapai hasil yang dapat diterima (Barston, 2013). Melalui konteks tersebut, Takhta Suci melakukan diplomasi dan negosiasinya untuk kembali merekonsiliasi posisinya dalam mengotorisasi kembali para prelat Gerejawinya di Tiongkok.

Peristiwa penting yang menandai lahirnya era baru diplomasi Takhta Suci terhadap Tiongkok ialah saat Paus Benediktus XVI mengeluarkan surat terbuka kepada umat Katolik Tiongkok pada 30 Juni 2007, yang mengisyaratkan keinginan Takhta Suci untuk membangun kembali hubungan diplomatik resmi dengan Pemerintah RRT (Heyndrickx, 2007). Melalui surat tersebut, Paus Benediktus XVI menggarisbawahi pentingnya persatuan serta mengisyaratkan kesediaan Takhta Suci untuk terlibat dalam “dialog-dialog konstruktif dan penuh hormat” dengan para Uskup di Tiongkok, serta dengan Pemerintah RRT (Heyndrickx, 2007). Menyikapi surat tersebut, Pemerintah RRT bereaksi dan mencoba mencegah umat Katolik di Tiongkok dalam mengakses surat tersebut dengan memblokir situs web serta menyita salinan cetak dari surat tersebut (Criveller, 2023).

Diplomasi Takhta Suci kemudian mulai menunjukkan titik terang ketika pada September 2007, seorang pastor berafiliasi CCPA yaitu Pastor Joseph Li Shan dijadikan Uskup Agung Beijing oleh Pemerintah RRT (BBC, 2007). Kardinal sekaligus Menteri Luar Negeri Vatikan, Mgr. Tarcisio Pietro Evasio Bertone mengatakan bahwa Pastor Joseph Li Shan “sangat bagus, dan sangat cocok” untuk diangkat sebagai Uskup Agung Beijing (BBC, 2007). Reaksi Kardinal Bertone tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan diplomatik kedua belah pihak mulai membaik, serta secara tidak langsung menunjukkan bahwa Takhta Suci sudah mulai mendapatkan kembali otoritasnya atas para prelat Gerejawinya di Tiongkok (BBC, 2007). Para pengamat menilai, bahwa meskipun surat terbuka yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XVI tidak bermuatan politik, surat tersebut berimplikasi secara politis terhadap hubungan diplomatik kedua entitas tersebut, dibuktikan dengan diangkatnya Pastor Joseph Li Shan (BBC, 2007).

Pada Mei 2008, berkat diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci, China Philharmonic Orchestra (CPO), sebuah grup orkestra asal Beijing tampil dalam sebuah konser di Vatikan (Willey, 2008). Konser tersebut dipersembahkan bagi

Paus Benediktus XVI, yang juga merupakan seorang penggemar musik klasik (Willey, 2008). Yu Long, konduktor orkestra tersebut mengungkapkan bahwa konser tersebut membawa harapan bagi tersebarnya pesan-pesan kasih sayang dan perdamaian (Willey, 2008). Terselenggaranya konser ini dianggap sebagai upaya pendekatan kembali yang dilakukan oleh kedua entitas setelah puluhan tahun berada dalam kerenggangan diplomatik.

Paus Fransiskus, yang naik takhta pada tahun 2013 setelah menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri akibat penyakit, melanjutkan perjuangan para pendahulunya dalam menyatukan Gereja Katolik di Tiongkok. Tentu, diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus untuk kembali mengambil otoritas tersebut di Tiongkok tidaklah mudah. Selain karena Tiongkok berada dalam naungan rezim komunis, pemerintahan Xi Jinping mulai melakukan penataan lembaga-lembaga negara, termasuk melebur CCPA ke dalam sebuah organisasi yang bernama United Front Work Department of the Central Committee of the Chinese Communist Party pada tahun 2018 (Bowe, 2018).

Sepuluh tahun semenjak konser CPO di Vatikan, tepatnya pada 2018, Takhta Suci pada akhirnya berhasil meraih kembali otoritas tersebut. Dalam sebuah perjanjian yang dikeluarkan pada Januari 2018, Takhta Suci sepakat untuk membagi wewenang atas umat Katolik di Tiongkok (BBC, 2018). Pemerintah Tiongkok mendapat kebebasan dan wewenang dalam mengatur umat Katolik, termasuk mengontrol pergerakan “Gereja bawah tanah”, serta tetap menjalankan CCPA (BBC, 2018). Di lain sisi, Takhta Suci mempunyai wewenang dalam menunjuk para Uskup (BBC, 2018). Perjanjian ini tentu berhasil diwujudkan berkat penyelenggaran diplomasi dan negosiasi Takhta Suci yang intens dan konstruktif, setidaknya selama periode tahun 2008 hingga 2018.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada upaya diplomasi serta negosiasi yang dibangun oleh Takhta Suci terhadap RRT pada periode tahun 2008 hingga 2018, atas beberapa alasan. Pertama, diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam periode tersebut tergolong sukses (Mok, 2020), karena membuahkan kesepakatan yang dianggap menguntungkan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip negosiasi (Barston, 2013). Kedua, pada rentang waktu tersebut, terjadi

pergantian pemimpin Gereja Katolik, dari semula Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri pada tahun 2013, menjadi Paus Fransiskus, yang menjadi petahana hingga saat ini. Pergantian kepala negara serta kepala Gereja tentu sedikit banyak mempengaruhi kebijakan dalam gaya diplomasi yang dipraktikkan oleh Takhta Suci.

Isu ini menjadi penting dan layak untuk dibahas oleh peneliti atas beberapa alasan. Pertama, terdapat *gap*, di mana idealnya seorang Uskup diangkat dan ditahbiskan atas persetujuan Takhta Suci tanpa persetujuan pemerintah setempat, bukan ditunjuk oleh sebuah rezim komunis. Kedua, kita dapat melihat bagaimana dua pihak, yaitu Gereja Katolik, yang diwakili oleh Takhta Suci, dan juga Pemerintah RRT sama-sama memiliki kepentingan atas umat Katolik di Tiongkok. Gereja Katolik secara jelas ingin melanjutkan proyek ekspansi globalnya, sementara Pemerintah RRT berusaha untuk menciptakan stabilitas sosial di Tiongkok. Terakhir, terbelahnya umat Katolik di Tiongkok merupakan kasus yang unik, karena merupakan satu-satunya di dunia dalam sejarah modern Gereja Katolik. Terlebih, upaya diplomasi Takhta Suci dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan RRT yang masih berlangsung hingga saat ini juga memenuhi unsur *novelty* dalam penelitian ini.

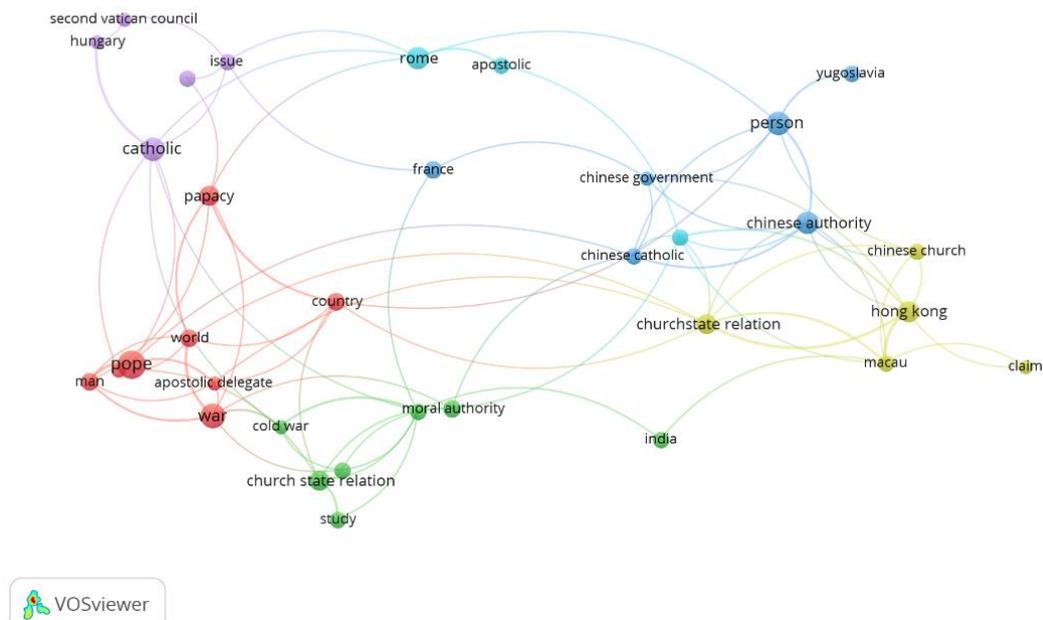
1.2. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam membentuk sebuah kerangka pemikiran, termasuk dalam menentukan konsep atau teori yang akan peneliti gunakan dalam meneliti kasus ini. Secara spesifik, penelitian yang menekankan pada upaya diplomasi Takhta Suci dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT pada tahun 2008–2018 termasuk belum banyak dilakukan. Meski demikian, penelitian lainnya yang bersinggungan dengan topik ini telah cukup banyak dilakukan oleh para akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian-penelitian lainnya, antara lain menekankan pada, misi Gereja Katolik di Tiongkok secara umum (Ljungstedt, 1836); keterlibatan para pastor atau misionaris Italia (Porfiri, 2015); misi berbagai ordo di Tiongkok (Li J. , 2022), (Smorzhevsky, 2019), (Paquette, 1987), (Fleming, 1987); prelat Gerejawi di

Tiongkok (Shupe, 2011); riwayat Gereja Katolik di Tiongkok (Clark, 2015), (Sweeten, 2020), (Dawson, 1955), (Ng & Fulda, 2018); serta Paus dan misi Gereja Katolik secara umum (Lamb, 2020), (Rooney, 2015), (Thavis, 2013), (Politi, 2015).

Untuk membuktikan *novelty* tersebut, peneliti menggunakan metode bibliometrik dengan menggunakan dua perangkat lunak yaitu Publish or Perish untuk mendapatkan database dan VosViewer untuk memetakan hasil penelitian. Bibliometrik adalah penggunaan metode statistik untuk menganalisis buku, artikel, dan publikasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan konten ilmiah (Ball, 2021). Peneliti menggunakan kata kunci *Holy See*, *Vatican*, *diplomacy*, *authority*, *China*, dan *Church prelate*. Dengan menggunakan kata kunci tersebut, peneliti menemukan sumber terkait, termasuk sumber-sumber yang terhimpun sejak tahun 1800-an. Dari database yang diperoleh di Publish or Perish, yang kemudian dipetakan oleh VosViewer, peneliti menemukan minimnya penelitian yang secara spesifik berfokus pada topik ini, sehingga peneliti memfokuskan analisisnya pada upaya diplomasi Takhta Suci dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT pada tahun 2008–2018. Berikut hasil pemetaan VosViewer yang dilakukan oleh peneliti:

Gambar 1.1 Hasil pemetaan VosViewer peneliti



Sumber: diolah oleh peneliti untuk keperluan penelitian

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lanxin Xiang (Xiang, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif guna membandingkan legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok di zaman pra-komunisme dan pasca-komunisme dalam menjamin eksistensi Gereja Katolik di Tiongkok. Data dari penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh dari studi literatur, dokumen-dokumen Gereja, buku-buku sejarah dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan konsep legitimasi atau penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh umat Gereja Katolik Tionghoa kepada Paus di Roma, dan atau pemerintah Tiongkok. Tujuan utama dari penelitian ini ialah memberikan jawaban atas pertanyaan “siapa yang seharusnya berwenang dalam menunjuk para prelat Gerejawi di Tiongkok?” Adapun tujuan lain dari penelitian ini ialah memberi gambaran mengenai dinamika kehidupan umat Katolik di Tiongkok, sebelum rezim komunis Mao memimpin Tiongkok dan mulai membatasi kehidupan keagamaan di Tiongkok, serta sesudah rezim komunis berkuasa di Tiongkok, dari tahun 1949 hingga saat ini.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Paul P. Mariani (Mariani, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menggambarkan otoritas yang dimiliki oleh “Gereja bawah tanah” dan “Gereja Patriotik” (CCPA) dalam menunjuk para prelat Gerejawi di Tiongkok. Data dari penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh dari studi literatur, dokumen Gereja, hasil wawancara serta buku-buku terkait. Penelitian ini menggunakan konsep otoritas, yang berpusat pada umat Katolik di Keuskupan Shanghai yang mempertanyakan otoritas CCPA dalam mengatur kehidupan keagamaan umat Katolik di Shanghai. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menjabarkan kompetisi antara “Gereja bawah tanah” dan “Gereja Patriotik” (CCPA) dalam menunjukkan otoritas dan eksistensinya masing-masing, serta upaya kedua kelompok dalam membuktikan klaim otoritas kepada masing-masing umatnya.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Andrew P. Lynch (Lynch, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menggambarkan tensi diplomatik yang terjadi antara Takhta Suci dengan RRT. Data dari penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, dokumen resmi Gereja, studi literatur,

artikel berita daring, serta literatur terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi karya Samuel P. Huntington, yang memiliki persepsi atas peran penting Gereja Katolik dalam membentuk “demokrasi yang ramah-Katolik” menjadi semakin mapan di berbagai negara-negara Amerika Selatan, seperti Brasil. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah memberikan gambaran yang mendetail serta menjabarkan tensi diplomatik antara Takhta Suci dengan RRT pasca-Mao dengan berdasar pada argumen-argumen Huntington atas pembentukan demokrasi.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Peter Moody (Moody, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menggambarkan hubungan diplomatik yang dianggapnya “penuh anomali” antara Takhta Suci dengan RRT, dan juga hubungan diplomatik resmi yang eksis antara Takhta Suci dengan Republik Tiongkok, atau yang lebih umum dikenal sebagai Taiwan. Data dari penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari artikel berita daring dan studi literatur. Tujuan dari penelitian ini ialah mempertanyakan RRT sebagai sebuah rezim dalam mengatur Gereja Katolik di Tiongkok, serta melihat posisi Taiwan sebagai satu-satunya tempat yang paling memungkinkan untuk mempertahankan sebuah nunsiat (perwakilan diplomatik Takhta Suci di suatu negara).

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Chit Wai John Mok (Mok, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menggambarkan pendekatan-pendekatan ulang yang digunakan oleh Paus Fransiskus selama berdiplomasi dalam mengambil kembali otoritas atas pengangkatan Uskup di RRT. Data dari penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti artikel berita daring, serta jurnal terkait. Penelitian ini menggunakan konsep realpolitik dalam meneliti diplomasi Paus Fransiskus di RRT sejak tahun 2013, yang lebih mengedepankan faktor-faktor dan pertimbangan praktis dan material, daripada ideologi atau etika. Tujuan dari penelitian ini ialah mengamati pendekatan-pendekatan ulang yang dilakukan Paus Fransiskus dengan konsep realpolitik, serta kaitan status Paus Fransiskus sebagai anggota Ordo Yesuit. Penelitian ini juga menyoroti serta menjabarkan keberhasilan-keberhasilan diplomatik Takhta Suci di Tiongkok semenjak Paus Fransiskus menjabat sebagai Kepala Negara Vatikan.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan pendekatan dan metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian yang peneliti lakukan di sini tentu berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal substansi. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai beberapa konsep umum dalam Gereja Katolik yang berkaitan erat dengan penelitian ini, guna memberikan kejelasan kepada para pembaca untuk menghindari ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Peneliti juga akan menyajikan data dan fakta terbaru terkait diplomasi Takhta Suci ini, yang tentunya bersumber dari sumber yang kredibel dan terbaru, untuk menciptakan kebaruan informasi dan data.

1.3. Rumusan Masalah

Pengangkatan seorang pastor menjadi Uskup berada dalam otoritas penuh Takhta Suci dengan persetujuan dan mandat Paus di Roma. Hal ini bersifat supranasional, karena tidak melibatkan pemerintah suatu negara dalam pengangkatannya. Sementara itu, pengangkatan sepihak para Uskup “Patriotik” oleh CCPA di RRT, tanpa adanya persetujuan atau mandat dari Takhta Suci, tentu bertentangan dengan hukum Gereja dan otoritas yang dimiliki Takhta Suci dalam mengangkat para prelat Gerejawi bagi umat Katolik di suatu keuskupan. Adanya *gap* otoritas dalam pengangkatan Uskup di Tiongkok ini kemudian memunculkan pertanyaan penelitian: “Bagaimana Takhta Suci Vatikan berdiplomasi dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT pada tahun 2008–2018?”

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mendeskripsikan otorisasi prelat Gerejawi di RRT; dan mendeskripsikan diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT pada tahun 2008–2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, antara lain:

- a. Manfaat Akademis: peneliti berharap hasil penelitian ini mampu berkontribusi bagi kajian-kajian dalam Hubungan Internasional, utamanya dalam kajian diplomasi, otoritas, serta rezim. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini mampu memberikan inspirasi bagi para peneliti lainnya dalam mengembangkan penelitian dengan topik serupa.
- b. Manfaat Praktis: peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menjadi media pembelajaran dan sumber ilmu pengetahuan, tidak hanya bagi kalangan pengkaji Hubungan Internasional, melainkan juga bagi masyarakat luas yang membaca hasil penelitian ini. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini mampu menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga serupa dalam proses pengambilan kebijakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian. Setelah menguraikan landasan konseptual yang terdiri dari konsep diplomasi, konsep otoritas, konsep hierarki Gereja Katolik, serta teori konsensus, pada bagian kedua akan dipaparkan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menciptakan alur pikir yang diterapkan dalam penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam berupaya mengambil kembali otoritas atas prelat Gerejawi di RRT dari periode tahun 2008 hingga 2018.

2.1. Landasan Konseptual

Konsep serta teori yang digunakan oleh peneliti dalam landasan konseptual tentunya menjadi modal bagi peneliti dalam membingkai kerangka analisis dalam penelitian ini. Adapun poin-poin dalam konsep diplomasi antara lain berisi definisi, metode-metode diplomasi, jenis-jenis diplomasi, serta kaitan antara diplomasi dengan negosiasi. Kemudian, konsep otoritas digunakan untuk menilai serta memahami wewenang yang dimiliki sebuah institusi atau individu, yang dalam konteks ini, wewenang Takhta Suci dalam mengangkat serta menahbiskan seorang Uskup. Karena istilah-istilah dalam Gereja Katolik termasuk tidak umum di masyarakat Indonesia, peneliti juga akan menjelaskan konsep hierarki dalam Gereja Katolik, guna memberikan kejelasan serta menghindari kesalahan informasi dalam penelitian ini. Dalam melihat upaya kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan bersama, yaitu Takhta Suci dan pemerintah Tiongkok, peneliti menggunakan teori konsensus.

2.1.1. Konsep Diplomasi

Dalam memahami metode dan jenis diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci, peneliti menggunakan konsep diplomasi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Melalui penjelasan R.P. Barston, diplomasi dapat dipahami sebagai “upaya negara, atau aktor lainnya dalam mengartikulasikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan tertentu atau yang lebih luas, menggunakan korespondensi, pembicaraan pribadi, pertukaran pandangan, lobi, kunjungan, ancaman, serta hal-hal terkait lainnya” (Barston, 2013).

Barston kemudian membagi tugas-tugas diplomasi menjadi enam kategori utama, yaitu: “seremonial, manajemen, informasi dan komunikasi, negosiasi internasional, kewajiban perlindungan, serta kontribusi kepada rezim internasional” (Barston, 2013). Barston juga menjabarkan bahwa representasi formal, protokol serta adanya partisipasi dalam lingkaran diplomatik di sebuah ibu kota negara, atau kehadiran perwakilan resmi dalam sebuah lembaga internasional, menjadi elemen penting bagi kedaulatan sebuah negara, serta bagian dalam pewujudan gagasan masyarakat internasional (Barston, 2013).

Robert F. Trager menjelaskan, bahwa dalam praktiknya, “diplomasi dapat diwujudkan melalui tulisan atau secara lisan” (Trager, 2016). Diplomasi kemudian menjadi “instrumen utama dan penting dalam kebijakan luar negeri yang mewakili tujuan dan strategi yang lebih luas yang memandu interaksi suatu negara dengan seluruh dunia” (Winter, 2014). Hasil-hasil diplomasi tentunya beragam. Pada umumnya, diplomasi menghasilkan sebuah perjanjian, traktat, pembentukan aliansi, investasi ataupun manifestasi lainnya yang diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja sama (Winter, 2014). Secara umum, diplomasi dipraktikkan oleh para diplomat atau representasi formal lainnya (Trager, 2016).

Dalam kajian Hubungan Internasional, diplomasi dapat dipandang sebagai seni atau ilmu (Boudreau & McDaniel, 2022). Baik sebagai seni, ataupun sebagai ilmu, diplomasi diarahkan untuk senantiasa mempertahankan hubungan-hubungan yang penuh kedamaian di antara bangsa-bangsa, antar kelompok, maupun antar individu (Boudreau & McDaniel, 2022). Dalam mempertahankan hubungan-hubungan damai tersebut, negara-negara membangun perwakilan diplomatik,

menjalin hubungan formal, serta membuka kedutaan besar yang sifatnya permanen di ibukota negara tiap-tiap negara yang terlibat (Boudreau & McDaniel, 2022).

Seperti yang telah peneliti tulis sebelumnya, diplomasi dilakukan melalui beberapa metode. Adapun metode-metode dalam diplomasi menurut Barston, ialah sebagai berikut (Barston, 2013):

1. Strategi kerja sama: kerja sama menjadi pusat bagi sebagian besar aktivitas diplomatik. Metode-metode utama dalam strategi kerja sama antara lain: pertukaran pandangan; penyusunan draft; intensi kebijakan; mencari dukungan untuk sebuah inisiatif; membangun hubungan bilateral atau koalisi; serta negosiasi.
2. Strategi komunikasi: menurut Barston, metode komunikasi dapat dibagi lagi menjadi empat sub-bagian, yaitu: citra/kehadiran; penyampaian pesan; serangan; serta diplomasi kontra-publik. Dalam diplomasi kontemporer, komunikasi menjadi gagasan yang krusial. Sebagian alasannya ialah adanya pertumbuhan teknologi dan media terkait, yang menawarkan ruang lingkup yang mudah bagi penyebaran dan penerimaan informasi.
3. Lingkungan operasional dan media: dalam lingkup ini, kita memahami bahwa media mampu menjadi salah satu alat dalam diplomasi. Lingkungan media sendiri sebenarnya sulit diprediksi dan seringkali bertentangan dengan suatu isu. Sebagai contoh, Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sasaran kritik media atas insiden-insiden yang mempertanyakan netralitas pasukan tersebut.
4. Perlawanan dan penundaan: metode ini dimaksudkan untuk memindahkan diplomasi ke wilayah-wilayah non-kooperatif untuk menghindari pengalihan akomodasi. Metode ini meliputi: pencarian klarifikasi; keputusan untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut; penyusunan perubahan dalam kerangka kerja sama, dengan tujuan mengubah, menunda atau memblokir proposal atau inisiatif kerja sama.
5. Strategi kontra: strategi diplomatik ini menggunakan beberapa metode seperti kerja sama, penggunaan media, negosiasi, sanksi ekonomi, atau melalui tindakan koersif. Secara politik, strategi kontra digunakan untuk

mengembangkan dukungan bilateral, membangun koalisi yang lebih luas serta membagi kelompok atau aliansi dalam kancah internasional.

6. Strategi ekspansi: metode ini mengisyaratkan intensi sebuah negara dan atau aktor lain dalam berupaya memperluas pengaruh dan ruang diplomasi mereka melalui pengelompokan, institusi, dialog dan perwakilan daripada dalam pengertian teritorial.
7. Strategi aktif: metode ini merujuk pada keseluruhan orientasi kebijakan luar negeri dalam berupaya memperluas peran, aktivitas, serta pengaruh suatu negara atau organisasi. Sebuah negara dapat berperan sebagai mediator, pemberi ide dalam penyelesaian sebuah masalah, ataupun hanya bekerja di belakang layar. Strategi ini umumnya diwujudkan melalui pengadaan acara internasional bersama, mensponsori sebuah resolusi serta menginisiasi sebuah mediasi.

Diplomasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, tergantung indikatornya. Diplomasi yang dikelompokkan berdasarkan cara diplomasi tersebut dilaksanakan dapat dibagi menjadi diplomasi bilateral, diplomasi trilateral, diplomasi multilateral, diplomasi publik, serta diplomasi *metaverse* (DiploFoundation, 2022). Sementara itu, diplomasi yang dikelompokkan berdasarkan bidang topiknya antara lain: diplomasi digital, diplomasi pembangunan, diplomasi ekonomi, diplomasi dunia maya, diplomasi energi, diplomasi kesehatan, diplomasi sains, diplomasi olahraga, diplomasi iklim, diplomasi pendidikan, serta jika disangkutkkan dengan konteks penelitian ini, diplomasi keagamaan (DiploFoundation, 2022).

Terdapat tiga jenis diplomasi yang dijadikan sub-konsep utama dalam penelitian ini, yaitu: diplomasi publik, diplomasi rahasia dan diplomasi kepausan. Diplomasi publik secara sederhana dapat diartikan sebagai “program atau kebijakan yang disponsori suatu pemerintah dengan tujuan untuk menginformasikan atau memengaruhi opini publik di negara lain” (Wolf, Jr & Rosen, 2004). Anthony Pratkanis kemudian menggambarkan sifat diplomasi publik yaitu “hangat” dan “transparan” (Pratkanis, 2009). Dengan demikian diplomasi publik menjadi mudah untuk diidentifikasi dan diobservasi.

Sementara itu, diplomasi rahasia dijelaskan oleh Stuart Murray sebagai “praktik diplomasi dengan cara menyembunyikan informasi dari individu tertentu atau kelompok” (Murray, 2016). Murray juga memberi beberapa contoh informasi yang umumnya dirahasiakan oleh sebuah pemerintah, misalnya: desain senjata, operasi militer dan taktik negosiasi diplomatik (Murray, 2016). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pihak-pihak tertentu, terlebih media dan pemerintah negara lain, untuk mengetahui rencana atau taktik yang mereka miliki. Adapun diplomasi kepausan dijelaskan oleh Kiril P. Kartaloff sebagai “seluruh rangkaian aktivitas diplomatik yang diselenggarakan oleh Takhta Suci, menyangkut seluruh aktivitas dalam institusi Gereja Katolik” (Kartaloff, 2015). Sebagaimana kita ketahui, dalam konsep hierarki Gereja Katolik, Takhta Suci mewakili tiga elemen penting, yaitu Paus, Kuria Roma, dan Gereja Katolik (Ratzinger & Schönborn, 1994). Paus, secara historis, disebut memiliki peran krusial dalam berdiplomasi, mewakili institusi Gereja Katolik yang dipimpinnya (Baynes, 1926). Di zaman lampau, diplomasi kepausan juga disebut sebagai “diplomasi eklesiastikal”, “diplomasi pontifikal” dan “diplomasi Vatikan” (Kartaloff, 2015).

Metode, praktik dan jenis-jenis dalam lingkup diplomasi modern saat ini dapat ditelusuri dari kebiasaan berdiplomasi bangsa-bangsa Eropa (Winter, 2014). Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 membuat tata cara diplomatik menjadi lebih terstruktur dan lebih profesional. Konvensi ini juga menjamin hak-hak khusus dalam misi diplomatik, sehingga para pelakunya tidak takut terhadap intimidasi dari pihak negara lain (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1961). Kekebalan diplomatik atau *diplomatic immunity* dilandaskan atas konvensi ini. Per tahun 2021, 193 negara telah meratifikasi Konvensi Wina, termasuk di antaranya Takhta Suci yang mewakili Negara Kota Vatikan, serta RRT. Bahkan, Takhta Suci memiliki status terkhusus dalam kekebalan diplomatik yang ditetapkan melalui konvensi ini (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1961).

Dalam strategi kerja sama, kita dapat melihat bahwa negosiasi menjadi metode utama dalam sebuah hubungan diplomatik demi terbangunnya jalinan kerja sama antara dua pihak atau lebih. Menurut Barston, negosiasi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengeksplorasi dan merekonsiliasi posisi yang bertentangan untuk mencapai hasil yang dapat diterima (Barston, 2013). Tujuan negosiasi ialah

untuk mengidentifikasi area kepentingan dan konflik bersama, terlepas dari apapun sifat hasilnya, serta apakah negosiasi tersebut lebih menguntungkan satu pihak dari yang lain (Barston, 2013). Selain mendamaikan kepentingan-kepentingan yang berbenturan, negosiasi juga berfungsi untuk melakukan penundaan, publisitas, mengalihkan perhatian, serta mengumpulkan intelijen dari suatu pihak (Barston, 2013).

Fred C. Iklé kemudian menghindari cakupan negosiasi yang telah lama didefinisikan hanya sebagai kegiatan tawar-menawar dan atau komunikasi (Iklé, 1964). Iklé kemudian mendefinisikan negosiasi sebagai proses di mana proposal eksplisit diajukan seolah-olah demi mencapai sebuah kesepakatan mengenai pertukaran atau realisasi kepentingan bersama, di mana sebenarnya terdapat kepentingan-kepentingan yang berbenturan (Iklé, 1964). Dapat kita pahami, bahwa negosiasi akan cenderung terjadi apabila terdapat kepentingan yang berbenturan dari kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak berupaya untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, dalam upaya menemukan hasil yang dinilai menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sebagai salah satu subyek dalam hukum internasional, Takhta Suci juga berdiplomasi dalam memainkan banyak peran di berbagai isu internasional. Selain didominasi oleh diplomasi-diplomasi keagamaan, Takhta Suci, yang mewakili Negara Kota Vatikan, serta seluruh umat Katolik di seluruh dunia, juga berpartisipasi dalam kelembagaan PBB, seperti menjadi negara pengamat non-anggota dalam Majelis Umum PBB sejak 1964, anggota tetap International Atomic Energy Agency (IAEA), serta menjadi pengamat tetap di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang bermarkas di Paris (Rahman, 1999). Hingga 2022, Takhta Suci sudah secara resmi membangun hubungan diplomatik dengan 180 negara. Namun demikian, Takhta Suci tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Pemerintah RRT (Chan, 1989). Meski demikian, Takhta Suci tetap melakukan kontak formal dengan Pemerintah RRT selama puluhan tahun, termasuk bernegosiasi untuk kembali mendapat otoritas penuh dalam penangkatan dan penahbisan Uskup di RRT (Chan, 1989).

2.1.2. Konsep Otoritas

Konsep otoritas digunakan peneliti untuk memahami kapasitas kedua belah pihak, yaitu Takhta Suci dan pemerintah Tiongkok dalam menunjuk para prelat Gerejaawi. Otoritas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai “hak hukum bagi individu, lembaga atau atasan untuk memerintah individu lainnya atau bawahannya” (Vedantu, 2023). Menurut Stanley Milgram, otoritas yang diperoleh “harus dijalankan sesuai dengan seberapa besar otoritas itu diberikan kepada individu atau lembaga tersebut, dan semestinya tidak dijalankan melebihi otoritas yang diperoleh tersebut” (Milgram, 1974). Otoritas juga kerap disandingkan dengan konsep kekuasaan. Jika kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain, maka otoritas adalah hak untuk melakukannya (Heywood, 2013). Oleh karena itu, otoritas selalu didasarkan pada kewajiban yang diakui untuk dipatuhi, bukan kepatuhan terhadap segala bentuk paksaan atau manipulasi.

Sebagai sebuah konsep, “otoritas” telah dipertanyakan jauh sebelum adanya peradaban modern. Para pemikir Yunani Kuno seperti Plato telah mencoba merumuskan konsep otoritas. Plato menemukan, bahwa pada dasarnya, otoritas diperlukan untuk menghindari kekerasan, serta dalam konteks saat itu, menjadi alternatif bagi pemerintah Yunani dalam mengurus rumah tangganya (Arendt, 1961). Pemikiran mengenai konsep “otoritas” kemudian dipertanyakan juga di Roma, dan kemudian menjadi salah satu topik yang digemari di berbagai mazhab ilmuwan Gereja Katolik, salah satunya Thomisme yang berkembang atas warisan pemikiran Santo Thomas Aquinas (McDermott, 1989).

Menurut Kustermans dan Horemans, terdapat setidaknya empat konsepsi utama otoritas dalam kajian Hubungan Internasional (Kustermans & Horemans, 2022). Keempat konsepsi utama tersebut ialah otoritas sebagai kontrak, otoritas sebagai dominasi, otoritas sebagai impresi, dan otoritas sebagai konsekrasi (Kustermans & Horemans, 2022). Keempat tipologi otoritas tersebut didasarkan atas dua alasan utama. Pertama, otoritas dibangun atas dasar pengalaman para pemegang otoritas, maupun bawahan, yang kemudian berdampak pada stabilitas otoritas. Kedua, munculnya otoritas-otoritas internasional bukan untuk

melemahkan kedaulatan sebuah negara, justru sebaliknya, memperkuat kedaulatan negara itu sendiri (Kustermans & Horemans, 2022).

Menurut Milgram, konsep otoritas akan selalu berkaitan dengan konsep “kepatuhan” (Milgram, 1974). Kepatuhan pada otoritas merupakan kecenderungan orang untuk berusaha menyenangkan mereka yang bertanggung jawab (McCombs School of Business, 2017). Kepatuhan juga merupakan “mekanisme psikologis yang menghubungkan tindakan individu dengan tujuan politik” (Milgram, 1974). Kepatuhan itu kemudian diibaratkan oleh Milgram sebagai “semen perekat disposisional” yang mengikat aktivitas manusia pada sistem otoritas yang diakuinya (Milgram, 1974). Oleh sebab itu, masyarakat cenderung terikat pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas resmi yang memerintah mereka.

Sebagai salah satu subyek dalam hukum internasional, sejarah otoritas Takhta Suci dapat ditarik hingga ke Abad Pertengahan. Julia Costa López menjelaskan bahwa sejak abad pertengahan, telah terjadi benturan otoritas dan kedaulatan antara pihak kerajaan di Eropa dengan Gereja Katolik (Costa López, 2020). Gereja Katolik saat itu memang memiliki kekuasaan yang terkadang lebih dominan daripada monarki setempat. Meski demikian, pemikir lainnya seperti Andrew Latham dan John G. Ruggie berpendapat bahwa Gereja Katolik memang memiliki otoritas politik, namun dengan basis legitimasi yang sepenuhnya terpisah dengan monarki (Latham, 2012) (Ruggie, 1993). Arangio-Ruiz kemudian berpendapat bahwa sejak Abad Pertengahan, Takhta Suci telah menjadi aktor dalam evolusi hukum internasional, bahkan sejak sebelum pembentukan negara bangsa yang kuat (Arangio-Ruiz, 1996).

Menurut Robert J. Araujo, Gereja Katolik menegakkan otoritasnya atas umat Katolik di seluruh dunia, melalui kedaulatan yang dimiliki oleh Takhta Suci itu sendiri (Araujo, 2013). Takhta Suci, yang mewakili tiga elemen penting yaitu Paus, Kuria Roma dan Gereja Katolik, mempraktikkan kedaulatannya dengan membangun hubungan diplomatik dengan setidaknya 180 negara di seluruh dunia. Takhta Suci telah memainkan banyak peran dalam penyelesaian sengketa internasional, pengiriman bantuan kemanusiaan, advokasi hukum-hukum internasional, serta lainnya, atas nama Gereja Katolik (Araujo, 2013). Dengan demikian, Takhta Suci yang mewakili tiga elemen tersebut, mampu memperoleh

pengakuan internasional atas eksistensinya, dan menjadi satu-satunya otoritas keagamaan di dunia yang mampu melaksanakan kegiatan diplomatik.

Dalam tubuhnya sendiri, Takhta Suci bertindak sebagai otoritas resmi yang menjalankan administrasi Gereja Katolik di seluruh dunia. Takhta Suci bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang sah dalam menunjuk dan mengangkat seorang Uskup, membentuk atau mengubah status sebuah keuskupan, mengeluarkan dekret atau dokumen resmi atas nama Gereja Katolik, menjalankan misi karya pastoral Paus, serta bertindak sebagai entitas resmi yang menjalankan hubungan diplomatik dengan ratusan pihak di seluruh dunia (Norwich, 2012). Peran Takhta Suci tersebut juga telah secara resmi tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik yang berlaku secara universal (Norwich, 2012).

2.1.3. Konsep Hierarki Gereja Katolik

Peneliti menyadari, meskipun Gereja Katolik merupakan lembaga keagamaan internasional tertua dan terbesar di dunia, dengan jumlah anggota sekitar 1,345 milyar umat pada 2019 (L'Osservatore Romano, 2019), persentase umat Katolik di Indonesia tergolong rendah, yaitu hanya 3,12% atau sekitar 8,3 juta jiwa dari total populasi Indonesia yang mencapai 270 juta penduduk pada tahun 2018 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018). Dengan demikian, istilah-istilah keagamaan dalam Gereja Katolik menjadi kurang umum dan kurang dipahami oleh mayoritas penduduk Indonesia. Meskipun tersusun dengan sistematis, istilah-istilah dalam Gereja Katolik terbilang sangat banyak. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penjelasan istilah-istilah tersebut pada cakupan “hierarki Gereja Katolik”, yang berkaitan erat dengan konsep Takhta Suci, otoritas Gereja dan penyaluran kekuasaan dalam Gereja Katolik.

Pada dasarnya, hierarki Gereja Katolik terdiri dari para Uskup, para pastor dan para diakon (Ratzinger & Schönborn, 1994). Uskup merupakan rohaniwan yang ditahbiskan, ditunjuk oleh Takhta Suci di Vatikan, bertugas mewujudkan otoritasnya dalam memimpin sebuah “keuskupan sufragan”. Tugas seorang Uskup disebut sebagai “episkopat”. Sementara itu, Uskup Agung merupakan Uskup di sebuah “keuskupan agung”, keuskupan yang mendapat titel lebih tinggi dari

keuskupan-keuskupan sufragan di bawahnya, karena adanya latar belakang sejarah tertentu. Secara hierarkis, Uskup Agung berada di atas para Uskup Sufragan (Ratzinger & Schönborn, 1994).

Paus, pemimpin Gereja Katolik di seluruh dunia, sebenarnya adalah seorang Uskup. Bapa Suci Paus merupakan Uskup bagi Keuskupan Roma. Secara historis, Uskup Roma merupakan Uskup kepala bagi seluruh uskup di dunia, merupakan Wakil Kristus di Dunia, sebagai penerus kepemimpinan Paus pertama yaitu Santo Petrus yang menjabat sekitar tahun 30 M–68 M. Paus juga bertindak sebagai Kepala Negara Kota Vatikan dan Patriark Gereja Latin. Takhta Suci bertindak atas dasar yurisdiksi Paus, sebagai Uskup Roma. Dapat disimpulkan, secara hierarkis, Paus berada di atas para Uskup Agung, dan para Uskup Sufragan di bawah para Uskup Agung (Ratzinger & Schönborn, 1994). Jabatan Paus saat ini diemban oleh Paus Fransiskus dari Argentina, sejak tahun 2013.

Takhta Suci merupakan otoritas yang menjalankan pemerintahan dalam Gereja Katolik, yang dijalankan oleh Kuria Roma. Kuria Roma terdiri dari lembaga-lembaga administrasi dan merupakan lembaga pusat yang menjalankan urusan-urusan Gereja Katolik. Kuria Roma digunakan oleh Paus dalam menjalankan tugas pastoral atau tugas pengembalaanya. Melalui Kuria Roma pula, Paus menunjuk utusan-utusan tertingginya, yaitu para Nunsius Apostolik (setara Duta Besar) untuk dikirim ke seluruh perwakilan diplomatik Takhta Suci di seluruh dunia (Ratzinger & Schönborn, 1994). Kuria Roma umumnya diketuai oleh para Kardinal (Ratzinger & Schönborn, 1994).

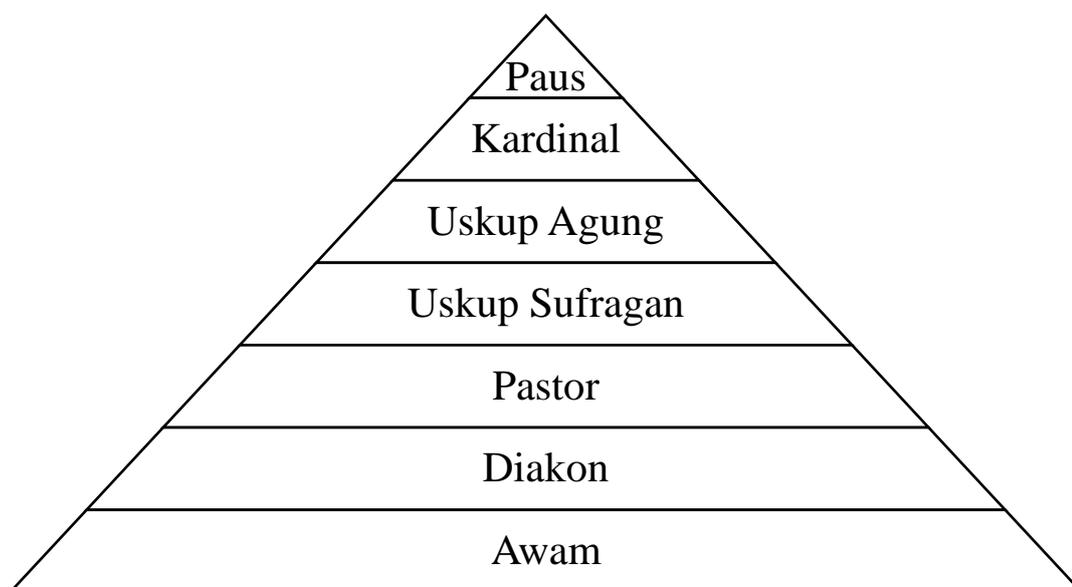
Kardinal merupakan prelat atau pejabat senior dalam Gereja Katolik yang ditunjuk langsung oleh Paus. Kardinal sebenarnya tidak termasuk hierarki Gereja Katolik, namun merupakan jabatan fungsional di luar struktur hierarki tersebut. Tugas utama Kardinal ialah menjadi penasihat Paus. Seluruh Kardinal dari seluruh dunia kemudian tergabung dalam Dewan Kardinal, sebuah dewan yang bertugas memilih penerus Paus dalam sebuah pemilihan tertutup di Kapel Sistina, Vatikan, yang bernama “konklaf” (L'Osservatore Romano, 1969). Konklaf hanya diselenggarakan ketika Paus yang sedang menjabat meninggal dunia, atau dalam kasus yang paling langka, mengundurkan diri. Paus Benediktus XVI, Paus yang

menjabat sebelum Paus Fransiskus merupakan Paus kedua dalam sejarah Gereja Katolik yang mengundurkan diri pada tahun 2013 (Cullinane, 2013).

Istilah “prelat” digunakan untuk mewakili para rohaniwan yang berkedudukan tinggi dalam Gereja Katolik. Seorang Uskup merupakan “prelat” atas gereja partikularnya, yaitu sebuah keuskupan. Uskup menjadi pimpinan para pastor dan diakon yang berada di keuskupannya. Seorang Uskup memiliki tiga tugas utama, yaitu sebagai Nabi untuk mengajar umat di keuskupannya, sebagai Imam untuk memimpin perayaan Misa Kudus di Gereja, serta sebagai Raja untuk memimpin umat di keuskupannya (Ratzinger & Schönborn, 1994). Pada umumnya di sebuah negara, para Uskup dari seluruh penjuru negeri membentuk sebuah perkumpulan bagi para Uskup yang dinamai konferensi para uskup. Di Indonesia, konferensi tersebut bernama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) (Kantor Waligereja Indonesia, 2015). Selain para Uskup yang termasuk dalam “prelat Gerejawi”, para pemimpin biara, atau yang umumnya dipanggil Abbas, juga dimasukkan ke dalam golongan “prelat Gerejawi” (Ratzinger & Schönborn, 1994).

Untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas terkait hierarki Gereja Katolik, berikut peneliti lampirkan diagram hierarki Gereja Katolik:

Gambar 2.1 Hierarki Gereja Katolik



Sumber: (Ratzinger & Schönborn, 1994), (Woestman, 2006), dan (Glatz, 2020).

2.1.4. Teori Konsensus

Peneliti menggunakan teori konsensus dalam melihat upaya kedua belah pihak, yaitu Takhta Suci dan pemerintah Tiongkok sebagai pihak yang setara dalam mencapai kesepakatan atas otorisasi pengangkatan prelat Gerejawi di Tiongkok. Secara etimologis, konsensus berasal dari bahasa Latin, “*consensus*” yang berarti persetujuan atau kesatuan (Neves, 2015). Sebagai salah satu dari teori-teori rumpun sosial, teori konsensus yang merangkul sistem politik atau ekonomi tertentu sebagai sistem yang adil, menyatakan bahwa perubahan sosial harus terjadi di dalam institusi sosial yang telah disediakan olehnya (Neves, 2015).

Teori konsensus berpendapat bahwa aturan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat, atau struktur dalam masyarakat tersebut, menentukan tingkah laku anggotanya, serta menyalurkan tindakan mereka dengan berbagai cara yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain (Eviany, 2019). Konsensus ditujukan untuk menghasilkan suatu kesepakatan umum yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu, dalam perdebatan sosiologis, konsensus selalu dianggap sebagai bentuk kontras dari konflik (Oxford Reference, 2011).

Sebagai sebuah teori, konsensus bukanlah gagasan kontemporer, melainkan telah dipertanyakan jauh sebelum adanya peradaban modern. Para filsuf Yunani Kuno, sebagai contoh Aristoteles, mempercayai bahwa jika suatu pendapat didukung oleh mayoritas, maka pendapat tersebut pasti benar, sehingga secara umum diterima sebagai suatu bukti kebenaran (*consensus gentium*) (Neves, 2015). Aristoteles kemudian memasukkannya dalam kumpulan gagasan Etika Nikomakea (Irwin, 1985). Meski demikian, filsuf-filsuf skeptis lainnya menekankan bahwa dukungan mayoritas tidak menyiratkan atau belum merepresentasikan kebenaran dari pernyataan tersebut (Neves, 2015).

Untuk memahami intensi Takhta Suci dan pemerintah Tiongkok, kita harus melihat konsensus dari sudut pandang pluralisme masyarakat kontemporer. Dalam sudut pandang tersebut, konsensus masih dipahami sebagai “kesepakatan”, tetapi bukan sebagai titik tolak untuk memahami suatu realitas, terlebih sebagai tujuan yang harus dikejar sehari-hari (Day & Parnell, 2003). Dalam pengertian ini, fokus

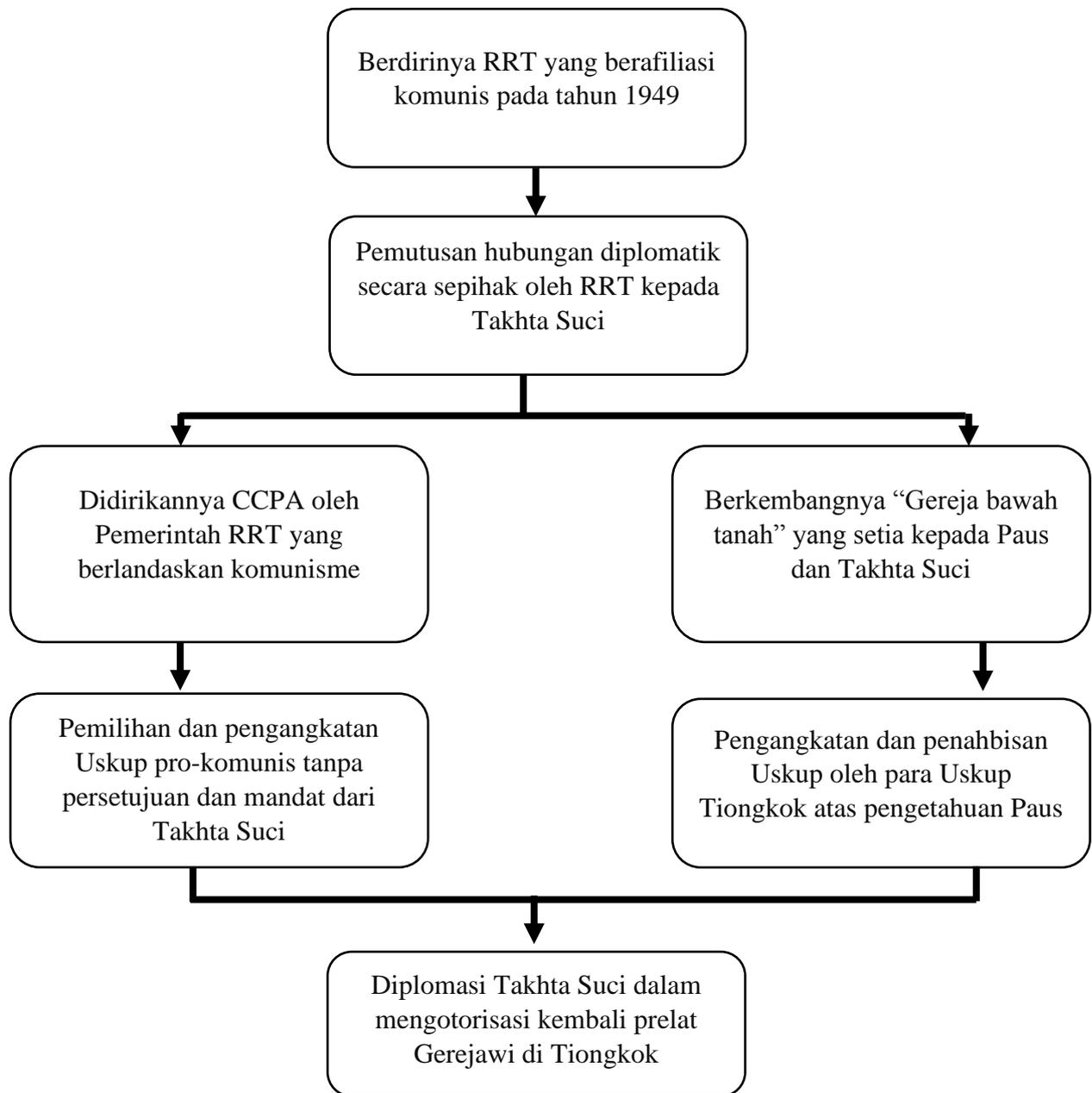
konsensus tidak hanya pada tujuan yang akan dicapai, melainkan juga pada jalan yang harus ditempuh, serta pentingnya sarana dalam meraih tujuan-tujuan yang diinginkan pihak-pihak yang terlibat (Neves, 2015). Oleh karena itu, meskipun secara teori itu penting, konsensus tidak hanya dicapai melalui rasionalisasi berbagai posisi dalam konflik, melainkan juga melalui pembentukan kondisi yang ideal dengan menggunakan landasan pemikiran yang tepat (Neves, 2015).

Hanya melalui sudut pandang pluralisme masyarakat kontemporer, para filsuf mengusulkan teori-teori konsensus yang bertujuan untuk saling mengakui legitimasi posisi yang bertentangan (Neves, 2015). Tujuan lainnya juga untuk mencapai kesepakatan tentang persepsi atas hal kebaikan dan kebenaran dalam artian sempit, atau pada pemenuhan kondisi untuk generalisasi aturan dalam artian luas (Neves, 2015). Dalam penelitian ini, posisi legitimasi Takhta Suci, sebagai pemegang sah dan satu-satunya yang secara universal bertindak menunjuk dan mengangkat para prelat Gerejawi di seluruh dunia ditentangkan dengan legitimasi yang dimiliki oleh CCPA. Peneliti kemudian menggunakan sudut pandang pluralism masyarakat kontemporer dalam teori konsensus ini untuk melihat bagaimana pihak-pihak yang bertentangan, yaitu Takhta Suci dan Pemerintah RRT bertujuan untuk saling mengakui legitimasi satu sama lain yang bertentangan dalam meraih kesepakatan umum.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan oleh peneliti untuk membangun pola pikir yang diterapkan dalam penelitian ini, serta memvisualisasi diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam berupaya mengambil kembali otoritas atas prelat Gerejawi di RRT pada tahun 2008–2018.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.



Sumber: diolah sendiri untuk keperluan penelitian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyediakan penjelasan metodologis yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan fokus penelitian yaitu pada upaya Takhta Suci berdiplomasi kepada Pemerintah RRT dalam mengotorisasi kembali prelat Gerejanya di Tiongkok pada tahun 2008–2018. Sumber data yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sumber-sumber sekunder. Data dan fakta dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data dan triangulasi data, untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dalam penelitian ini. Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada kepraktisannya yang didasarkan pada observasi terhadap kejadian yang telah terjadi. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi secara detail dan kronologis. Analisis yang dibangun oleh peneliti didasarkan atas konsep-konsep yang peneliti gunakan, serta didukung oleh data dan fakta yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pendekatan kualitatif berbasis analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam terkait fenomena-fenomena yang terdapat dalam penelitian ini.

Alan Bryman menjabarkan bahwa penelitian kualitatif bersifat induktif, interpretatif, dan konstruktif (Bryman, 2012). Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, peneliti merasa bahwa pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini, terlebih dalam mendeskripsikan diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT. Sifat pendekatan kualitatif yang kronologis juga membantu peneliti dalam mendeskripsikan upaya diplomasi yang dibangun oleh Takhta Suci secara urut dalam periode waktu 2008 sampai 2018.

Dalam mengaplikasikan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada langkah-langkah penelitian kualitatif karya Bryman (Bryman, 2012). Pada tahap awal, peneliti memunculkan permasalahan riset secara umum terkait bagaimana diplomasi Takhta Suci dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT pada tahun 2008–2018 dilaksanakan. Selanjutnya, peneliti melakukan seleksi tempat dan subjek yang relevan berkaitan dengan Takhta Suci dan RRT. Di tahap berikutnya, peneliti melakukan pengumpulan data yang dianggap relevan dari sumber-sumber sekunder yang kredibel dan relevan, seperti situs resmi Takhta Suci Vatikan, situs resmi pemerintah dan lembaga-lembaga RRT, jurnal terkait seperti *Journal of Church and State*, dokumen resmi yang dikeluarkan Gereja Katolik seperti dekret Kepausan, dan sebagainya.

Peneliti kemudian melakukan interpretasi data terkait upaya diplomasi yang coba dibangun oleh Takhta Suci kepada Tiongkok. Setelah membangun kerangka konseptual atau teoretis berdasarkan interpretasi data, peneliti menyempitkan pertanyaan penelitian, serta apabila diperlukan, peneliti melakukan pengumpulan data tambahan, misalnya dari situs media seperti BBC, Vatican News, *South China Morning Post*, *L'Osservatore Romano*. Pada tahap akhir, peneliti menuliskan temuan serta konklusi terkait upaya diplomasi yang coba dibangun oleh Takhta Suci tersebut secara detail dan kronologis. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah melihat bagaimana Takhta Suci melakukan diplomasinya dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT. Dalam rentang waktu diplomasi yang cukup panjang, peneliti memfokuskan penelitian ini pada upaya diplomasi yang dibangun pada tahun 2008 sampai dengan 2018. Alasannya ialah selain karena periode waktu tersebut tergolong masih baru, namun juga karena upaya diplomasi yang dilakukan tergolong sangat pesat yang mengarah kepada tercapainya konsensus kedua belah pihak (Mok, 2020). Pada periode waktu tersebut, peneliti juga akan sedikit banyak mendeskripsikan perbedaan dan persamaan diplomasi Takhta Suci di bawah kepemimpinan Paus Benediktus XVI yang menjabat dari tahun 2005 hingga 2013, dan penerusnya yaitu Paus Fransiskus yang menjadi petahana sejak tahun 2013.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan riset ini hanya kepada upaya Takhta Suci berdiplomasi kepada Pemerintah RRT, dan bukan sebaliknya. Adapun alasannya ialah karena Takhta Suci merupakan pihak yang berkepentingan dan termasuk dirugikan dari kasus ini. Penunjukkan dan pengangkatan seorang Uskup merupakan murni tugas dari Takhta Suci dan bukan dari pemerintahan sebuah negara, terlebih negara dengan rezim komunis. Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci terhadap Tiongkok tentu bukan perkara mudah, mengingat rezim otoriter Tiongkok mempunyai kuasa kendali penuh atas rakyatnya, termasuk terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang eksis di negaranya, tidak terkecuali Gereja Katolik. Dengan memfokuskan penelitian terhadap upaya diplomasi Takhta Suci tersebut, peneliti berharap mampu menjawab pertanyaan penelitian ini secara detail, deskriptif dan kronologis.

3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sekunder sebagai sumber data. Sesuai dengan kategorisasi (Bryman, 2012), peneliti mengumpulkan data utama yang bersumber dari situs web resmi Takhta Suci (*www.vatican.va*) untuk

memperoleh dokumen resmi terkait, seperti Surat Gembala Paus, ensiklik Paus¹ dan lainnya. Konstitusi dan laporan pihak administrative RRT peneliti peroleh dari situs web resmi Kongres Nasional RRT (www.npc.gov.cn). Selain itu, data-data lain seperti hasil wawancara dengan tokoh Gereja Katolik di Tiongkok diperoleh dari media berita daring seperti BBC dan Reuters (sebagai contoh Kardinal RRT yaitu Kardinal Joseph Zen yang berkomentar atas perjanjian provisional Takhta Suci-RRT), publikasi di surat kabar atau majalah misalnya L'Osservatore Romano, jurnal terkait seperti Journal of Church and State dan The China Quarterly, laporan demografis yang diterbitkan oleh Pew Research Center, serta sumber-sumber daring yang kredibel dan terbaru seperti BBC, South China Morning Post, dan Vatican News (Bryman, 2012).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik studi literatur dengan mempelajari dokumen, jurnal atau laporan terkait upaya diplomasi Takhta Suci terhadap RRT dalam mengotorisasi prelat Gerejawinya. Adapun data yang dikumpulkan berupa teknik diplomasi yang digunakan oleh Takhta Suci, negosiasi yang diajukan oleh kedua belah pihak, kompromi yang coba dibangun oleh Takhta Suci, serta data terkait perkembangan umat Katolik di RRT selama periode waktu yang dipilih oleh peneliti. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui metode *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan studi tentang dokumen yang berupa teks dengan berbagai format, atau gambar, audio serta video (Bryman & Bell, 2011).

Saat melakukan studi pustaka, peneliti menemukan ratusan dokumen Takhta Suci yang berkaitan dengan RRT di situs resmi Takhta Suci. Peneliti menggunakan situs resmi Takhta Suci sebagai sumber primer dalam penelitian ini untuk memenuhi validitas dan kredibilitas data. Dengan merujuk pada metode *content analysis*, peneliti memilih serta mengerucutkan ratusan dokumen Takhta Suci tersebut menjadi beberapa kategori utama agar lebih terfokus dan spesifik dalam mendukung proses analisis data.

¹ Ensiklik merupakan “surat amanat Paus” atau “surat edaran Paus” (Rice, 2015).

Peneliti melakukan kategorisasi dokumen yang berkaitan dengan diplomasi publik Takhta Suci kepada RRT. Pertama, surat apostolik yang merupakan surat gembala yang diumumkan oleh Paus di Roma. Kedua, catatan eksplanatori Paus atas kasus atau kejadian tertentu yang terjadi atau menyangkut RRT. Ketiga, pesan tertulis yang diajukan Paus kepada pihak-pihak tertentu di RRT, sebagai contoh kepada para pimpinan biara, Kardinal, atau Nunsius Apostolik. Peneliti juga menemukan beberapa rilis pers terkait, umumnya berupa pernyataan-pernyataan lisan Paus atau petinggi Kuria Roma dalam bentuk wawancara dengan pers, audiensi umum dan percakapan yang terjadi selama kunjungan formal utusan RRT di Vatikan.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis reduksi data, yang kemudian akan disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh (Miles dkk., 2019). Pada tahapan awal yaitu reduksi data, peneliti mereduksi data yang diperoleh dari situs resmi Takhta Suci, laporan resmi, dokumen Gereja, ataupun sumber daring lainnya untuk memilih serta mengerucutkan data agar lebih terfokus dan spesifik dalam mendukung proses analisis data. Kemudian, pada tahap penyajian data, peneliti menyajikan data yang tereduksi, kemudian dianalisis menggunakan konsep diplomasi, konsep otoritas, konsep hierarki Gereja Katolik serta teori konsensus. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan yang telah dielaborasi.

Untuk menghindari subjektivitas dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan teknik analisis triangulasi data. Triangulasi data mengacu pada “penggunaan beberapa metode atau sumber data dalam penelitian kualitatif untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diangkat” (Patton, 1999). Triangulasi juga dipandang sebagai “strategi penelitian kualitatif dalam menguji validitas melalui konvergensi informasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang kredibel” (Denzin, 1978). Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan tiga sumber utama dalam menguji validitas penelitian ini.

Data tersebut berasal dari tiga pihak berbeda, yaitu Takhta Suci, RRT, serta pihak netral, seperti laporan lembaga, atau organisasi internasional terkait. Data utama yang berasal dari ketiga sumber tersebut kemudian dilengkapi dengan data tambahan yang berasal dari media internasional, wawancara tokoh terkait, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dalam melakukan triangulasi data, peneliti menggabungkan data yang dihimpun dari berbagai sumber untuk membentuk suatu pemahaman atas suatu fenomena. Data yang terhimpun dari ruang, waktu, dan sumber yang berbeda kemudian disatukan untuk menentukan pemahaman atau gagasan dasar dalam membentuk sebuah argumen penelitian. Argumen penelitian yang didapatkan dari triangulasi tersebut didasarkan atas konsep dan teori yang peneliti gunakan. Argumen-argumen tersebut yang kemudian peneliti gunakan dalam membentuk kerangka pemikiran dan utamanya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Dengan demikian, pemahaman dan argumen yang dibangun melalui triangulasi data ini dapat lebih komprehensif dan valid.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan simpulan dan saran yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Pada bagian simpulan, peneliti akan memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Peneliti juga akan menguraikan poin-poin utama dari tiap-tiap jenis diplomasi yang digunakan oleh Takhta Suci, yaitu diplomasi publik, diplomasi rahasia dan diplomasi kepausan. Pada bagian selanjutnya, saran peneliti diajukan kepada pihak terkait, khususnya pada para pengkaji Hubungan Internasional.

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci dalam mengotorisasi prelat Gerejawi di RRT pada 2008–2018 diwujudkan melalui tiga jenis diplomasi, yaitu diplomasi publik, diplomasi rahasia, dan diplomasi kepausan. Ketiga jenis diplomasi tersebut membawa karakteristik dan elemennya masing-masing, namun dengan tujuan yang sama, yaitu meraih otorisasi kembali atas prelat Gerejawi di RRT. Otorisasi yang diperoleh oleh Takhta Suci diwujudkan melalui hak veto yang dimiliki oleh Takhta Suci dalam meninjau nominasi Uskup yang diajukan oleh CCPA, sementara Pemerintah RRT berhak untuk tetap menjalankan CCPA dan mengatur “Gereja bawah tanah” secara domestik.

Diplomasi publik yang dipraktikkan oleh Takhta Suci diwujudkan melalui tiga metode utama, yaitu strategi kerja sama, strategi ekspansi dan strategi komunikasi. Strategi kerja sama diwujudkan melalui negosiasi untuk mencapai konsensus atas otorisasi prelat Gerejawi, strategi ekspansi diwujudkan melalui penyampaian intensi Gereja Katolik untuk tetap menjadi pihak yang sah dalam otorisasi tersebut, serta strategi komunikasi Takhta Suci dalam diplomasi publik

diwujudkan melalui *speech act* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan pejabat Takhta Suci. Melalui diplomasi publik ini, Takhta Suci ingin mencapai tujuan utamanya yaitu mencapai konsensus atas sengketa otoritas prelat Gerejawi di RRT serta membina hubungan bilateral yang lebih baik dengan Pemerintah RRT. Sementara itu, gaya diplomasi yang dibawakan oleh Takhta Suci dalam diplomasi publik ini ialah menggunakan bahasa yang apresiatif kepada umat Katolik di RRT, serta Tiongkok secara kultural. Secara khusus, diplomasi publik Takhta Suci dirumuskan oleh C. W. J. Mok dalam kerangka Riccian (Mok, 2020) yang mendasarkan diplomasi publiknya pada kisah hidup Pastor Matteo Ricci di Tiongkok.

Sementara itu, diplomasi rahasia yang dipraktikkan oleh Takhta Suci diwujudkan melalui metode strategi komunikasi. Takhta Suci menggunakan strategi komunikasi, utamanya dalam menyampaikan gagasan dalam kerangka negosiasinya, misalnya pengiriman telegram atau penyampaian gagasan dalam negosiasi. Tujuan diplomasi rahasia Takhta Suci lebih ditujukan untuk mencapai kata sepakat atau konsensus dalam negosiasi otorisasi prelat Gerejawi, daripada diplomasi publik yang mengedepankan pembangunan citra positif Gereja Katolik di RRT dan seluruh dunia. Isu-isu lain seperti keinginan terbangunnya hubungan diplomatik resmi Takhta Suci-RRT, isu hubungan bilateral Takhta Suci-Taiwan, atau keadaan umat Katolik di RRT tidak sama sekali disungguh dalam negosiasi Takhta Suci dalam diplomasi rahasia ini.

Terakhir, sebagai lembaga keagamaan terbesar di dunia, Takhta Suci yang mewakili Gereja Katolik juga menjalankan diplomasi kepausan. Diplomasi ini diwujudkan melalui doa-doa yang didaraskan dan dipimpin oleh Paus, sebagai kepala Gereja Katolik seluruh dunia. Dalam beberapa kesempatan, doa-doa yang dibawakan oleh Paus menyinggung atau diintensikan bagi umat Katolik di RRT, misalnya ketika Paus mendoakan korban tragedi Ledakan Pelabuhan Tianjin tahun 2015. Melalui diplomasi kepausan tersebut, Takhta Suci setidaknya hendak mencapai tiga tujuan utama, yaitu menunjukkan kepeduliannya kepada umat Katolik di RRT, menunjukkan sisi kemanusiaan dalam sebuah musibah, serta menyuarakan harapan akan persatuan Gereja Katolik di RRT.

Perjanjian Provisional 2018 yang disetujui oleh Takhta Suci dan Pemerintah RRT menjadi hasil dari diplomasi yang diusahakan oleh Takhta Suci. Terjadinya pergantian pemimpin Gereja Katolik dari Paus Benediktus XVI menjadi Paus Fransiskus menjadikan karakteristik diplomasi yang dibawakan sedikit berbeda. Meskipun demikian, tujuan diplomasi untuk meraih otorisasi atas prelat Gerejawi di RRT telah tercapai, meski harus menghadapi banyak tantangan. Otorisasi yang diraih oleh Takhta Suci tersebut pun sebenarnya tidak penuh, karena melalui perjanjian tersebut, Takhta Suci sepakat untuk membagi wewenang atas prelat Gerejawi dengan Pemerintah RRT. Oleh karena itu, otoritas yang didapatkan oleh Takhta Suci tersebut masih belum utuh karena tidak sesuai dengan otoritas tradisional yang dimiliki oleh Takhta Suci itu sendiri, sementara Pemerintah RRT meraih otoritas legal-rasional atas prelat Gerejawi di RRT.

Secara konseptual, dapat disimpulkan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci berorientasi pada beberapa tujuan utama. Tujuan tersebut bergantung pada signifikansi jenis diplomasi yang diusung. Diplomasi publik mengungkap signifikansi pembentukan citra publik yang lebih baik dengan propaganda, diplomasi rahasia membawa signifikansinya pada pencapaian konsensus melalui negosiasi, sementara diplomasi kepausan membawa signifikansinya pada pembentukan ikatan batiniah dan emosional yang lebih erat antara Gereja Katolik universal dengan umat Katolik di Tiongkok. Melalui konsep otoritas, peneliti dapat simpulkan bahwa Takhta Suci, melalui sudut pandang pluralisme masyarakat kontemporer, bertujuan untuk memenuhi tujuan sehari-harinya, meski harus merelakan otoritas tradisionalnya yang telah ada selama ribuan tahun. Secara konsensus, perjanjian provisional 2018 tersebut setidaknya telah mewujudkan kepentingan dua belah pihak, setidaknya dalam meninjau dan mengangkat seorang Uskup bagi sebuah keuskupan di Tiongkok.

Meski perjanjian provisional 2018 telah memberikan posisi yang lebih leluasa kepada Takhta Suci di Tiongkok, namun persekusi yang diterima oleh umat Katolik tidak berarti telah dihentikan. Berbeda dengan pemerintahan Hu Jintao yang menyokong “masyarakat sosialis yang harmonis” yang telah menjamin kebebasan beragama, pemerintahan Xi Jinping terkenal keras kepada kelompok-kelompok keagamaan. Persekusi yang diterima oleh umat Katolik masih terus

berlangsung, misalnya pelarangan anak di bawah umur untuk masuk ke Gereja, pemotongan salib dari fasad gereja, penangkapan prelat Gerejawi dan awam, dan lain-lain. Hal tersebut tetap terjadi, meski nominasi Uskup telah menjadi hak veto Takhta Suci, dan kehadiran Gereja Katolik semakin nyata di Tiongkok Daratan.

Dapat peneliti simpulkan bahwa meskipun ketiga jenis diplomasi yang dilakukan Takhta Suci telah berhasil menghasilkan perjanjian provisional, di mana otoritas atas prelat Gerejawi di Tiongkok telah diraih meski dalam bentuk yang tidak utuh, namun derasnya pengaruh rezim totalitarian komunis Tiongkok belum mampu menjamin kebebasan bagi semua unsur keagamaan Katolik untuk dapat berjalan dengan aman. Konstitusi RRT tahun 1982 dan gagasan filosofis “masyarakat sosialis yang harmonis” memang sempat menjamin kebebasan beragama di Tiongkok. Secara kontras, pemerintahan Xi Jinping, dengan ide-ide komunisnya justru melakukan persekusi yang sistematis kepada seluruh kelompok keagamaan. Dengan demikian, meski Takhta Suci telah mewujudkan eksistensinya secara lebih lanjut di Tiongkok, namun kebebasan bagi umat Katolik untuk dapat beribadah dengan leluasa masih belum dapat dirasakan di era Xi Jinping.

5.2. Saran

Melalui penelitian ini, peneliti mengajukan saran kepada para pengkaji Hubungan Internasional. Adapun saran-saran tersebut, antara lain:

- a. Kepada para pengkaji Hubungan Internasional untuk dapat berkontribusi terhadap penggalian informasi dan paparan yang lebih mendetail serta spesifik pada langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh Takhta Suci kepada Pemerintah RRT dalam otorisasi prelat Gerejawi. Dengan demikian, temuan-temuan yang lebih mendetail serta spesifik mendorong kualitas penelitian menjadi lebih baik serta mampu membawa dampak praktis dan akademis kepada banyak pihak, khususnya akademisi dan praktisi kajian diplomasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arangio-Ruiz, G. (1996). *Revue Belge de Droit International. Belgian Review of International Law*, 354.
- Araujo, R. J. (2013). The Nature and Role of the Catholic Church. *E-International Relations*, 1-5.
- Arendt, H. (1961). *Between Past and Future*. London: Penguin Classics.
- Asia Times. (2016). *Pope Francis' Interview with Asia Times*. Diakses melalui dari Asia Times Website: <https://zenit.org/articles/pope-francisinterview->
- Austin, J. L. (1975). *How to do things with words*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ball, R. (2021). *Handbook Bibliometrics*. Berlin: De Gruyter.
- Baran, M. (2009,). *"Historic map coming to Minnesota"*. Diakses melalui dari Minnesota Public Radio: <http://minnesota.publicradio.org/display/web/2009/12/16/tulip-map/>
- Barston, R. P. (2013). *Modern Diplomacy*. Abingdon: Routledge.
- Baynes, N. (1926). Alexandria and Constantinople: A Study in Ecclesiastical Diplomacy. *The Journal of Egyptian Archaeology*, 145-156.
- Bays, D. H. (2011). *A New History of Christianity in China*. Chichester: John Wiley & Sons.
- BBC. (2007, September 21). *China installs Pope-backed bishop*. Diakses melalui dari BBC Website: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7005927.stm>

- BBC. (2018). *China, the Vatican and a controversial deal*. Diakses melalui dari BBC Website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42914029>
- Bendix, R. (1977). *Max Weber: an intellectual portrait*. Berkeley: University of California Press.
- Bernardelli, G. (2022). *Vatican says China has violated agreement with Msgr Peng appointment*. Diakses melalui dari AsiaNews Website: <https://www.asianews.it/news-en/Vatican-says-China-has-violated-agreement-with-Msgr-Peng-appointment--57194.html>
- Berridge, G. (2022). *Diplomacy: Theory and Practice*. Jenewa: DiploFoundation.
- Bew, J. (2014). *The Real Origins of Realpolitik*. Diakses melalui dari The National Interest: <https://nationalinterest.org/article/the-real-origins-realpolitik-9933>
- Bodeen, C. (2018). *Group: Officials destroying crosses, burning bibles in China*. Diakses melalui dari Website Associated Press: www.apnews.com/c09b2ee4b71540c8a7fd6178820c5970
- Boudreau, D., & McDaniel, M. (2022). *Diplomacy*. Diakses melalui dari National Geographic Website: <https://education.nationalgeographic.org/resource/diplomacy>
- Bowe, A. (2018). *China's Overseas United Front Work: Background and Implications for the United States*". Washington D.C.: United States-China Economic and Security Review Commission.
- Brockhaus, H. (2023). *Report: Chinese bishop appointed to Shanghai without Vatican approval*. Diakses melalui dari Catholic News Agency Website: <https://www.catholicnewsagency.com/news/254017/chinese-bishop-appointed-to-shanghai-without-vatican-approval>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- _____, & Bell, E. (2011). *Business Research Methods. 3rd Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Busky, D. F. (2000). *Democratic Socialism: A Global Survey*. Westport: Praeger.

- Catholic News Agency. (2018). *120 Martyrs of China*. Diakses melalui dari Catholic News Agency Website: <https://www.catholicnewsagency.com/saint/120-martyrs-of-china-533>
- CECC. (2011). *Annual Report 2011*. Washington, D.C.: Congressional-Executive Commission on China.
- Chalufour, M. (2023). *What's behind Boom of Christianity in China?* Diakses melalui dari Website The BRINK: <https://www.bu.edu/articles/2023/why-is-christianity-growing-in-china/>
- Chan, G. (1989). Sino-Vatican Diplomatic Relations: Problems. *The China Quarterly*, 814-836.
- Choonara, E. (2004). *Why revolutionaries oppose all oppression*. Diakses melalui dari Socialist Worker UK: <https://socialistworker.co.uk/features/why-revolutionaries-oppose-all-oppression/>
- Clark, A. E. (2011). *China's Saints: Catholic Martyrdom During the Qing (1644–1911)*. Maryland: Lehigh University Press.
- _____. (2015). *Heaven in Conflict: Franciscans and the Boxer Uprising in Shanxi*. Seattle: University of Washington Press.
- Coleman, W. M. (2014). Making the State on the Sino-Tibetan Frontier: Chinese Expansion and Local Power in Batang, 1842-1939. *Corpus*, 247-248.
- Cook, S. (2017). *Christianity: Religious Freedom in China*. Diakses melalui dari Website Freedom House: <https://freedomhouse.org/report/2017/battle-china-spirit-christianity-religious-freedom>
- Costa López, J. (2020). Political Authority in International Relations. *International Organization*, 223-248.
- Criveller, G. (2023). *Benedict XVI, his Letter to Chinese Catholics and Beijing*. Diakses melalui dari Asia News Website: <https://www.asianews.it/news-en/Benedict-XVI,-his-Letter-to-Chinese-Catholics-and-Beijing-57455.html>

- CRNTT. (2014). *Xi Jinping's Reply Letter to the Pope: The Year of Brahma May Break the Ice*. Diakses melalui dari CRNTT Website: <http://hk.crntt.com/doc/1030/8/0/8/103080886.html?coluid=2&kindid=4&docid=103080886&mdate=0319101111>
- Cullinane, S. (2013). *Pope Benedict XVI's resignation explained*. Diakses melalui dari CNN Website: <http://edition.cnn.com/2013/02/11/world/europe/pope-resignation-q-and-a/index.html>
- Dark, K. R. (2000). *Large-Scale Religious Change and World Politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Dawson, C. (1955). *The Mongol mission: narratives and letters of the Franciscan missionaries in Mongolia and China in the thirteenth and fourteenth centuries*. Kota New York: Sheed and Ward.
- Day, C., & Parnell, R. (2003). *Consensus Design: Socially inclusive process*. Oxford: Architectural Press.
- Denzin, N. K. (1978). Triangulation: A Case for Methodological Evaluation and Combination. *Sociological Methods*, 339-357.
- Dikötter, F. (2013). *The Tragedy of Liberation: A History of the Chinese Revolution, 1945-1957 (1 ed.)*. London: Bloomsbury Press.
- DiploFoundation. (2022). *Types of diplomacy*. Diakses melalui dari DiploFoundation website: <https://www.diplomacy.edu/topics/types-of-diplomacy/>
- Eviany, E. (2019). *Teknik Membangun Konsensus*. Jatinangor: FHTP IPDN.
- Fanning, W. (1912). *Visit ad Limina*. Diakses melalui dari New Advent Website: <http://www.newadvent.org/cathen/15478a.htm>
- Fenghuang. (2014). *Hong Kong Media: China and the Vatican have basically reached an agreement on the appointment of bishops*, *Fenghuang.com*, 2014-11-20 . Diakses melalui dari Fenghuang: http://news.ifeng.com/a/20141120/42526573_0.shtml

- Fleming, P. J. (1987). *CHOSEN FOR CHINA: THE CALIFORNIA PROVINCE JESUITS IN CHINA, 1928-1957: A CASE STUDY IN MISSION AND CULTURE*. Berkeley: Graduate Theological Union ProQuest Dissertations Publishing.
- Foust, M. (2020). *China Forcibly Removes Crosses from 250 Churches in a Single Province*. Diakses melalui dari Christian Headlines: <https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/china-forcibly-removes-crosses-from-250-churches-in-a-single-province.html>
- Gass, R. H., & Seiter, J. S. (2009). Credibility and Public Diplomacy. Dalam N. Snow, & P. M. Taylor, *Routledge Handbook of Public Diplomacy* (hal. 154 - 163). Kota New York: Routledge.
- Gavin. (2021). *Christianity in China*. Diakses melalui dari Webiste China Highlights: <https://www.chinahighlights.com/travelguide/christianity.htm>
- Geddes, B., Wright, J., & Frantz, E. (2018). *How Dictatorships Work*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Glatz, C. (2020). *Majority of cardinals-designate expected to attend consistory*. Diakses melalui dari Crux: <https://cruxnow.com/vatican/2020/11/majority-of-cardinals-designate-expected-to-attend-consistory>
- Grim, B. J., & Finke, R. (2010). *The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guo, B., & Guo, S. (2008). *China in a Search for Harmonious Society*. Pennsylvania: Lexington Books.
- Hadro, M. (2020). *'The Vatican lost everything, got nothing': An interview with Cardinal Zen*. Diakses melalui dari Catholic News Agency: <https://www.catholicnewsagency.com/news/43579/the-vatican-lost-everything-got-nothing-an-interview-with-cardinal-zen>
- Hamilton, K. (2001). *Documenting Diplomacy, Evaluating Documents*. Valetta: DiploFoundation.

Hebblethwaite, P. (1978). The Mariology of Three Popes. *Mary in Christian Tradition*, 54-68.

Heyndrickx, J. (2007). *Pastoral directives of Pope Benedict XVI for China*. Diakses melalui dari The Atlantic Website: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/07/pastoral-directives-of-pope-benedict-xvi-for-china/306075/>

Heywood, A. (2013). *The Palgrave Macmillan: Politics*. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Huanqiu. (2015, Januari 21). *教皇称随时愿意访问中国 回应“拒见达赖”传闻*. Diakses melalui dari Huanqiu: <https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnJGSYX>

Hurd, I. (1999). Legitimacy and Authority in International Politics. *International Organization*, 379–408.

I'Ching, T. (2022). *Why Do Chinese People See Christianity as a Cultural Invasion?* Diakses melalui dari Webiste Christianity Today: <https://www.christianitytoday.com/ct/2022/november-web-only/chinese-christianity-western-culture-imperialism.html>

Iklé, F. C. (1964). *How Nations Negotiate*. Kota New York: Harper & Row.

Introvigne, M. (2018). *Chinese academics claim that the Vatican-China Agreement follows the “Vietnamese model.” However, they misinterpret it*. Diakses melalui dari Bitter Winter: <https://bitterwinter.org/vietnamese-model-for-the-vatican-in-china/>

Irwin, T. (1985). *Nicomachean Ethics*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.

IST, S. (2011). *In a first, Shanghai-born Ming Dynasty bureaucrat and scientist Xu Guangqi to be beatified*. Diakses melalui dari Shanghai IST Website: <http://shanghaiist.com/2011/04/18/xu-guangqi-beatification.php>

- Joske, A. (2019). Reorganizing the United Front Work Department: New Structures for a New Era of Diaspora and Religious Affairs Work. *China Brief Volume: 19 Issue: 9*, 11-18.
- Kantor Waligereja Indonesia. (2015). *Profil KWI*. Diakses melalui dari KWI Website: <https://www.kawali.org/profil-kwi/>
- Kartaloff, K. P. (2015). *Papal Diplomacy*. Kota Vatikan: Takhta Suci.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Statistik Umat Menurut Agama di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kengor, P. G. (2019). *What Lenin said about Christians and socialism*. Diakses melalui dari The Institute for Faith & Freedom: Grove City College: <https://www.faithandfreedom.com/what-lenin-said-about-christians-and-socialism/>
- Keuskupan Hong Kong. (2017). *Hong Kong Catholic Church Directory 2017*. Diakses melalui dari Website Keuskupan Hong Kong: <https://catholic.org.hk/en/hongkongcatholicchurchdirectory/>
- Keuskupan Makau. (2020). *DIOCESE DE MACAU*. Diakses melalui dari Website Keuskupan Makau: <https://www.catholic.org.mo/>
- Kuiper, K. (2006). *Chinese Rites Controversy*. Diakses melalui dari Encyclopædia Britannica: <https://www.britannica.com/event/Chinese-Rites-Controversy>
- Kustermans, J., & Horemans, R. (2022). Four Conceptions of Authority in International Relations. *International Organization*, 204-228.
- Lam, A. (2011). . "Recalling the 1981 Episcopal Ordinations and Their Consequences for the Chinese Catholic Church. *Tripod*, 22–23.
- _____. (2017). *China a long way from 'Vietnam Model' in Holy See ties*. Diakses melalui dari LaCroix International: <https://international.la-croix.com/news/religion/china-a-long-way-from-vietnam-model-in-holy-see-ties/4499>

- Lamb, C. (2020). *The Outsider: Pope Francis and His Battle to Reform the Catholic Church*. McLean: Orbis.
- Latham, A. (2012). *Theorizing Medieval Geopolitics: War and World Order in the Age of the*. London: Routledge.
- Lau, M. (2020). *China's July talks with Vatican will have Taiwan looming in background*. Diakses melalui dari South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/article/3092830/chinas-july-talks-vatican-will-have-taiwan-looming-background>
- Lenin, V. (1905). *Socialism and Religion*. Moskow: Progress Publishers.
- Li, J. (2022). *Missions Étrangères de Paris (MEP) and China from the Seventeenth Century to the Present*. Leiden: BRILL.
- Li, X. (2017). *Huang Jiefu talks about the Vatican's participation in the meeting: After thinking about it, he really did diplomatic work*. Diakses melalui dari Phoenix TV Website: https://news.ifeng.com/a/20170317/50792770_0.shtml
- Lin, J. (2018). *Il Vaticano domanda ai vescovi legittimi di farsi da parte per lasciare spazio a quelli illegittimi*. Diakses melalui dari AsiaNews Website: <https://www.asianews.it/notizie-it/Il-Vaticano-domanda-ai-vescovi-legittimi-di-farsi-da-parte-per-lasciare-spazio-a-quelli-illegittimi-42896.html>
- Ljungstedt, A. (1836). *An historical sketch of the Portuguese settlements in China; and of the Roman Catholic church and mission in China*. Boston: James Munroe & Co.
- L'Osservatore Romano. (1969). *"Instruction on the dress, titles and coat-of-arms of cardinals, bishops and lesser prelates"*. Diakses melalui dari L'Osservatore Romano website: <http://www.fiu.edu/~mirandas/instruction69.htm>
- _____. (2019). *Pubblicati l'Annuario Pontificio 2021 e l'Annuario Statisticum Ecclesiae 2019*. Kota Vatikan: L'Osservatore Romano.

- Lynch, A. P. (2014). Beijing and the Vatican: Catholics in China. *SAGE Open*, 1-10.
- Mai, J. (2021). *Leadership in China's Communist Party: how general secretary became the country's top job*. Diakses melalui dari South China Morning Post Website: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3132631/chinas-communist-party-how-general-secretary-became-countrys>
- Mares, C. (2022). *Cardinal Tagle defends Vatican-China deal*. Diakses melalui dari Website Catholic News Agency: <https://www.catholicnewsagency.com/news/252636/cardinal-tagle-defends-vatican-china-deal>
- _____. (2023). *Vatican-China deal 'not the best deal possible,' top Holy See diplomat says*. Diakses melalui dari Catholic News Agency Website: <https://www.catholicnewsagency.com/news/253860/vatican-china-deal-not-the-best-deal-possible-top-holy-see-diplomat-says>
- Mariani, P. P. (2016). The Four Catholic Bishops of Shanghai: “Underground” and “Patriotic” Church. *Journal of Church and State*, 1-19.
- Marx, K. (1843). *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*. Paris: Deutsch-Französische Jahrbücher.
- McCombs School of Business. (2017). *Ethics Unwrapped*. Diakses melalui dari McCombs School of Business Website: <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/obedience-to-authority>
- McDermott, T. S. (1989). *The Summa Theologiæ of St. Thomas Aquinas*. Notre-Dame, Indiana: Christian Classics.
- Memetaj, A. (2018). Diplomatic Forms and Styles of Negotiation. *Public Administration and Policy*, 1-15.
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications.

- Milgram, S. (1974). *Obedience to authority: an experimental view*. Abingdon: Taylor & Francis.
- Miller, G. (2016). *What Makes Successful Diplomacy*. Diakses melalui dari Australian Institute of International Affairs: <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/what-makes-successful-diplomacy/>
- Mok, C. J. (2020). Sino-Vatican Rapprochement: An Assessment of Pope Francis'. *JOURNAL OF CONTEMPORARY CHINA*, 1-15.
- Moody, P. (2019). The Vatican and Taiwan: An Anomalous Diplomatic Relationship. *JOURNAL OF CONTEMPORARY CHINA*, 3-4.
- Murray, S. (2016). Secret "versus" open diplomacy across the ages. Dalam C. Bjola, & S. Murray, *Secret Diplomacy: Concepts, contexts and cases* (hal. 13). Abingdon: Routledge.
- Neves, M. P. (2015). Consensus. *Encyclopedia of Global Bioethics*, 1-9.
- Ng, N., & Fulda, A. (2018). The Religious Dimensions of Hong Kong's Umbrella Movement. *Journal of Church and State*, 377-397.
- Ng, T., & Lau, M. (2018). "Fears about Chinese influence grow as more powers given to shadowy agency". Diakses melalui dari South China Morning Post: <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2138279/bigger-overseas-liaison-agency-fuels-fears-about>
- Nikolova, E., & Djankov, S. (2018). *Communism, religion, and unhappiness*. Diakses melalui dari Center for Economic Policy Research: <https://cepr.org/voxeu/columns/communism-religion-and-unhappiness#:~:text=Religious%20activities%20were%20suppressed%20in,churches%20were%20demolished%20or%20closed>.
- Norwich, J. J. (2012). *Absolute Monarchs: A History of the Papacy*. Kota New York: Penguin Random House.

- Oxford Reference. (2011). *consensus theory*. Diakses melalui dari Oxford Reference Website:
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095633739;jsessionid=92377613B38F2912091E0CEB6BD634BB>
- Paquette, J. (1987). *An uncompromising land; the London Missionary Society in China, 1807-1860*. Los Angeles ProQuest Dissertations Publishing: Los Angeles.
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis. *Health Services Research*, 1189-1208.
- Pemerintah Administratif Hong Kong. (1991). *An Introduction to Hong Kong Bill of Rights Ordinance*. Diakses melalui dari Constitutional and Mainland Affairs Bureau Website:
https://www.cmab.gov.hk/doc/en/documents/policy_responsibilities/the_rights_of_the_individuals/human/BORO-InductoryChapterandBooklet-Eng.pdf
- Pemerintah Administratif Makau. (1993). *Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China*. Diakses melalui dari Macau Government Official Website:
https://www.basiclaw.gov.mo/index_tc.aspx
- Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. (1982). *Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok 1982*. Beijing: Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.
- Pentin, E. (2013). *The Pope as Diplomat: How the Vatican Does Foreign Policy*. Diakses melalui dari Foreign Affairs:
<https://www.foreignaffairs.com/world/pope-diplomat>
- Perrow, C. (2014). *Complex Organizations: A Critical Essay*. Northbrook: Scott Foresman.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. Vienna: Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Pew Research Center. (2011). *The Pew Forum on Religion and Public Life: "Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population - Appendix C: Methodology for China"*. Washington, D.C.: Pew Research Center.
- Pin Mei, I. K. (1996). *The Chinese Catholic Patriotic Association*. Diakses melalui dari The Chinese Catholic Patriotic Association: <http://www.cardinalkungfoundation.org/ar/ChineseCatholicPatrioticAssoc.php>
- Politi, M. (2015). *Pope Francis Among the Wolves: The Inside Story of a Revolution*. Kota New York: Columbia University Press.
- Porfiri, A. (2015). Making music in the dragon's land : an Italian Priest and Macau in the 1920s. *Rivista internazionale di musica sacra* : XXXVI, 1-2.
- Pospelovsky, D. (1987). *A History of Marxist-Leninist Atheism and Soviet Antireligious Policies*. Kota New York: Macmillan Publishers.
- Pratkanis, A. (2009). Public Diplomacy in International Conflicts. Dalam N. Snow, & P. Taylor, *Routledge Handbook of Public Diplomacy* (hal. 111-112). Kota New York: Routledge.
- Pullella, P. (2022). *"Vatican confirms renewal of contested accord with China on bishops' appointments"*. Diakses melalui dari Reuters Web site: <https://www.reuters.com/world/china/vatican-confirms-renewal-contested-accord-with-china-bishops-appointments-2022-10-22/>
- Rahman , A. (1999). Church or state? The Holy See at the United Nations. *Conscience*, 2-5.
- Ramstein, R. (1948). *Manual of Canon Law*. Hoboken, New Jersey: Terminal Printing & Pub. Co.
- Ratzinger , J., & Schönborn, C. (1994). *Introduction to the Catechism of the Catholic Church*. San Francisco: Ignatius Press.

Reuters. (2018). *China-Vatican negotiations 'in full swing', Chinese official says*. Diakses melalui dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/uk-china-vatican-idUKKCN1GL179>

_____. (2018). *Exclusive: China-Vatican deal on bishops ready for signing - source*. Diakses melalui dari Reuters Website: <https://www.reuters.com/article/us-pope-china-exclusive-idUSKBN1FL67U>

_____. (2022). *Vatican confirms renewal of contested accord with China on bishops' appointments*. Diakses melalui dari Reuters Website: <https://www.reuters.com/world/china/vatican-confirms-renewal-contested-accord-with-china-bishops-appointments-2022-10-22/>

Rice, D. (2015). *"The papal encyclical: What is an 'encyclical'?"*. Diakses melalui dari USA Today Website: <https://www.usatoday.com/story/news/world/2015/06/16/pope-francis-encyclical/28814437/>

Rocca, F. X. (2018). *Vatican and China Sign Deal Over Bishops, Allowing Pope a Veto*. Diakses melalui dari The Wall Street Journal Website: <https://www.wsj.com/articles/vatican-and-china-agree-deal-over-bishops-allowing-pope-a-veto-1537613087>

_____. (2022). *Vatican and China Renew Agreement on Bishops as Beijing Tightens Control of Religion*. Diakses melalui dari Wall Street Journal: <https://www.wsj.com/articles/vatican-and-china-renew-agreement-on-bishops-as-beijing-tightens-control-of-religion-11666436864>

_____. (2022). *Vatican Says China Broke Agreement on Bishops*. Diakses melalui dari The Wall Street Journal Website: <https://www.wsj.com/articles/vatican-says-china-broke-agreement-on-bishops-11669480974>

Rooney, F. (2015). *The Global Vatican*. Washington, D.C.: Rowman & Littlefield.

- Ruggie, J. G. (1993). Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International. *International Organization*, 139–74.
- Schlosser, S. (2015). *Reproach vs. Rapprochement. 50 Years On: Probing the Riches of Vatican II*. Collegeville: Liturgical Press.
- Sherwood, H. (2018, September 18). "Vatican signs historic deal with China – but critics denounce sellout". Diakses melalui dari The Guardian Website: <https://www.theguardian.com/world/2018/sep/22/vatican-pope-francis-agreement-with-china-nominating-bishops>
- Shupe, A. (2011). *Rogue Clerics: The Social Problem of Clergy Deviance*. London: Transaction Publishers.
- Smit, J. O. (1951). *Pope Pius XII*. London: Burns, Oates & Washbourne.
- Smorzhevsky, F. (2019). *The Jesuits in China by Feodosy Smorzhevsky: An eyewitness account by an Eighteenth-Century Russian Orthodox monk*. Seattle: Amazon Kindle.
- Snow, N., & Taylor, P. M. (2009). *Routledge Handbook of Public Diplomacy*. Kota New York: Routledge.
- South China Morning Post. (2022). *Pope hopes deal with China on bishop appointments will be renewed soon*. Diakses melalui dari South China Morning Post Website: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3184266/pope-hopes-deal-china-bishop-appointments-will-be-renewed-soon>
- Sweeten, A. R. (2020). *China's Old Churches*. Leiden: BRILL.
- Takhta Suci. (1952). *Cupimus imprimis*. Kota Vatikan: Takhta Suci.
- _____. (1954). *Ad Sinarum gentem*. Kota Vatikan: Takhta Suci.
- _____. (1958). *Ad Apostolorum principis*. Kota Vatikan: Takhta Suci.
- _____. (2008). *ADDRESS BY HIS HOLINESS BENEDICT XVI AT THE CONCLUSION OF THE CONCERT GIVEN BY THE CHINA*

*PHILHARMONIC ORCHESTRA AND THE SHANGHAI OPERA HOUSE
CHORUS.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

Takhta Suci. (2008). *Angelus, 25 May 2008.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2009). *Regina Cæli, 24 May 2009.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2009). *Regina Cæli, 24 May 2009.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2013). *Habemus Papam.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2014). *IN-FLIGHT PRESS CONFERENCE OF HIS HOLINESS
POPE FRANCIS FROM KOREA TO ROME.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2015). *Angelus, 15 August 2015.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2015). *IN-FLIGHT PRESS CONFERENCE OF HIS HOLINESS
POPE FRANCIS FROM THE UNITED STATES OF AMERICA TO ROME.*
Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2015). *PRESENTATION OF THE CHRISTMAS GREETINGS TO
THE ROMAN CURIA.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2017). *Regina Cæli, 21 May 2017.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

_____. (2018). *MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS TO THE
CATHOLICS OF CHINA AND TO THE UNIVERSAL CHURCH.* Kota
Vatikan: Takhta Suci.

Takhta Suci. (n.d.). *Pius XII's encyclical.* Diakses melalui dari Website Takhta Suci:

https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_07101954_ad-sinarum-gentem.html

_____. (2008). *ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO THE
BISHOPS OF HONG KONG AND MACAO ON THEIR "AD LIMINA"
VISIT.* Kota Vatikan: Takhta Suci.

Tang, D. (2015). *Severe crackdown in China on church crosses draws backlash.*
Diakses melalui dari The Jakarta Post:

<https://www.thejakartapost.com/news/2015/08/05/severe-crackdown-china-church-crosses-draws-backlash.html>

Tang, E. (2020). Mainland China (Catholic). *Christianity in East and Southeast Asia*, 51-62.

Tanigawa, S. (2018). "The Policy of the Military "Supporting the Left" and the Spread of Factional Warfare in China's Countryside: Shaanxi, 1967–1968". *Modern China*, 35-67.

Thavis, J. (2013). *The Vatican Diaries: A Behind-the-Scenes Look at the Power, Personalities, and Politics at the Heart of the Catholic Church*. London: Penguin.

The Chinese Catholic Patriotic Association. (1996, April). Diakses melalui dari The Cardinal Kung Foundation: <http://www.cardinalkungfoundation.org/ar/ChineseCatholicPatrioticAssop hp>

The Standard. (2022). *Vatican envoy in Hong Kong warns Catholic missions to prepare for China crackdown*. Diakses melalui dari The Standard Website: <https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/191923/Vatican-envoy-in-Hong-Kong-warns-Catholic-missions-to-prepare-for-China-crackdown>

Torode, G. (2022). *Vatican envoy in Hong Kong warns Catholic missions to prepare for China crackdown*. Diakses melalui dari Reuters Website: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vatican-envoy-hong-kong-warns-catholic-missions-prepare-china-crackdown-2022-07-05/>

Trager, R. F. (2016). The Diplomacy of War and Peace. *Annual Review of Political Science*. 19, 205–228.

U.S. Department of State. (2010). *China (Includes Tibet, Hong Kong, Macau)*. Washington, D.C.: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor.

- Union of Catholic Asian News. (2012). *Fr Yue illicitly ordained in Harbin*. Diakses melalui dari Union of Catholic Asian News Website: <https://www.ucanews.com/news/fr-yue-illicitly-ordained-in-harbin/54833>
- _____. (2022). Diakses melalui dari Union of Catholic Asian News Website: <https://www.ucanews.com/news/church-to-beatify-early-china-convert-in-shanghai/13012>
- _____. (n.d.). *Church in China*. Diakses melalui dari Union of Catholic Asian News Website: <https://www.ucanews.com/directory/country/china/35>
- USCCB. (2020). Diakses melalui dari Appointing Bishops: <https://www.usccb.org/offices/general-secretariat/appointing-bishops>
- Vatican Press. (2018). *Communiqué concerning the signing of a Provisional Agreement between the Holy See and the People's Republic of China on the appointment of Bishops, 22.09.2018*. Diakses melalui dari Vatican Press Website: <https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2018/09/22/180922d.html>
- Vedantu. (2023). *What is Authority?* Diakses melalui dari Vedantu Website: <https://www.vedantu.com/commerce/concept-of-authority>
- Whitnall, A. (2019). *Repression in China at worst level since Tiananmen Square, HRW warns*. Diakses melalui dari Website The Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-repression-freedom-police-censorship-tiananmen-square-human-rights-watch-a8732501.html>
- Willey, D. (2008). *Chinese orchestra plays for Pope*. Diakses melalui dari BBC Website: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7389128.stm>
- Winter, J. (2014). The Diplomats. Dalam J. Winter, *The Cambridge History of the First World War: Volume II: The State* (hal. 68). Connecticut: Yale University Press.

- Woestman, W. (2006). *The Sacrament of Orders and the Clerical State*. Ottawa: St Paul's University Press.
- Wolf, Jr, C., & Rosen, B. (2004). *Public Diplomacy: How to Think About and Improve It*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Woolsey, T. S. (2017). *The Consequences of the Severance of Diplomatic Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Xiang, L. (2018). China and the Vatican. *Survival*, 88-92.
- XII, Paus Pius (1958). *Ad Apostolorum Principis*. Vatikan: Tipografia Poliglotta Vaticana.
- Xingyao, F. (2011). 汕頭教區黃炳章神父非法晉牧. Diakses melalui dari UCA News Website:
<http://china.ucanews.com/2011/07/14/%E6%B1%95%E9%A0%AD%E6%95%99%E5%8D%80%E9%BB%83%E7%82%B3%E7%AB%A0%E7%A5%9E%E7%88%B6%E9%9D%9E%E6%B3%95%E6%99%89%E7%89%A7/>
- Xiping, Z. (2007). Conversations between China and the West: The missionaries in early Qing Dynasty and their researches on the Book of Changes. *Frontiers of History in China*, pages469–492.
- Yaohui, C. (2010). *Hong Kong Media: China and the Vatican have basically reached an agreement on the appointment of bishops*, Fenghuang.com, 2014-11-20. Diakses melalui dari Ifeng Website:
http://news.ifeng.com/a/20141120/42526573_0.shtml
- Yi, X. (2012). 试论天主教爱国会的是非功过. Diakses melalui dari 21ccom:
<http://www.21ccom.net/articles/wztj/2012/0902/66790.html>
- Yin, H., & Chen, Y. (2020). Speech Act in Diplomacy: How China Makes Commitments in Diplomatic Press Conference. *International Journal of Language, Literature and Linguistics*, 170-176.

- Youmin, L. (2011). *Sino-Vatican relations are in ups and downs*. Diakses melalui dari 21ccom Website: http://www.21ccom.net/articles/qqsw/zlwj/article_2011070939007.html
- Young, E. P. (2013). *Ecclesiastical Colony: China's Catholic Church and the French Religious Protectorate*. Kota New York: Oxford University Press United States of America.
- Zaleski, P. (2005). *Prayer: a history*. . Boston: Houghton Mifflin Company.
- Zhang, J. (2017). *Sino-Vatican Faith Diplomacy: Mapping the Factors Affecting Bilateral*. Los Angeles: Figueroa Press.
- Zhu, R. X. (2017). The Division of the Roman Catholic Church in Mainland China: History and Challenges. *Religions*, 39.